

**BUMDES DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Derajat Sarjana Ekonomi Islam



Oleh :
SITI FATIMAH
NIM.132411052

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7601291
Semarang 50185

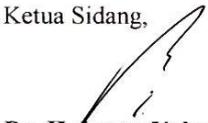
PENGESAHAN

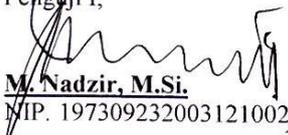
Nama : Siti Fatimah
NIM : 132411052
Judul : BUMDES Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam
Perspektif Ekonomi islam
(Studi kasus di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Desember 2018
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) tahun akademik 2018/2019.

Ketua Sidang,

Semarang, 27 Desember 2018
Sekretaris Sidang,

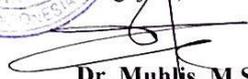

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001
Penguji I,


M. Nadzir, M.Si.
NIP. 197309232003121002
Pembimbing I

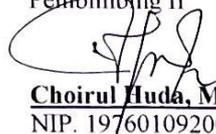

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 197003211996031003




Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 197003211996031003
Penguji II,


Dr. Muhljs, M.Si.
NIP. 196101171988031002

Pembimbing II


Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Siti Fatimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Siti Fatimah
Nim : 132411052
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : BUMDes dan Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 197003211996031003

Semarang, 19 November 2018
Pembimbing II



Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002

PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata, rasa syukur dan bangga Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Ayahandaku tercinta H. Muhammad Haidir Nur, dan Ibundaku tersayang Hj. Siti Mariam, yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan semangat untuk penyelesaian studi ku.

Adikku Katri Nada dan Muhammad Ramadhan yang telah selalu memberikan semangat

Almameterku, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2013
UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 November 2018
Deklator



**METERAI
TEMPEL**
E1DEDAFF41054965
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Fatimah
NIM. 132411052

ABSTRAK

Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah sebagai desa dengan tipologi desa pesisir yang sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan menjadikan penghasilan tidak menentu, sedangkan ketika masyarakat ingin beralih menjadi pengusaha kecil mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan modal, hal inilah yang juga menjadikan masih banyak keluarga miskin. Berbagai problematika tersebut tentunya menjadikan program BUMDes yang semula mengarah kepada pengentasan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah? 2) Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer yaitu dokumen dan wawancara dengan pengelola BUMDES dan masyarakat dan sumber data sekunder berupa kepala Desa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dilakukan pertama dengan ikut terlibat dalam perencanaan program BUMDES dan mengidentifikasi masyarakat yang layak mendapat bantuan program, mengikuti aturan pencairan pinjaman dan merencanakan kemajuan usaha yang dilakukan kelompok, kedua ikut melaksanakan program kerja dengan mengikuti aturan yang telah disepakati dan melakukan kerja kolektif kelompok usaha dengan memanfaatkan pinjaman sebaik mungkin bagi pengembangan usaha, ketiga melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan dan menerima pengawasan dari pengawas UPK dan saling tukar pikiran dengan pengawas dan kelompok untuk kemajuan bersama. 2) Perspektif ekonomi Islam terhadap peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah terletak pada adanya unsur kerja sama dan tolong menolong diantara masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro sehingga mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi umat yang berdasarkan *ta'awwun* dan *ukhuwah*.

Kata kunci: peran, BUMDES, pemberdayaan, ekonomi umat, Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

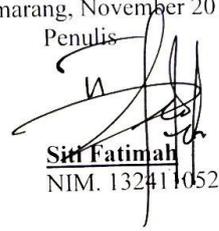
Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ahmad Furqon, Lc. MA selaku ketua Prodi Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
4. Mohammad Nadzir, M.SI., selaku sekretaris Prodi Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
5. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku pembimbing I dan Choirul Huda, M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ketua dan staf BUMDES yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan dalam penelitian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, November 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Fatimah', written over the printed name.

Siti Fatimah

NIM. 132411052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran	17
B. BUMDes.....	17
1. Pengertian BUMDes.....	17
2. Fungsi BUMDes.....	20
3. Tujuan BUMDes	20
4. Prinsip BUMDes	23
5. Program BUMDes.....	25
C. Pemberdayaan Ekonomi.....	26
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat	26
2. Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Umat	30
3. Indikator Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	31

4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat	32
5. Karakteristik Pemberdayaan Ekonomi Umat	33
6. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat	34
D. Ekonomi Islam	45
1. Pengertian Ekonomi Islam	45
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	47
3. Ciri-Ciri Ekonomi Islam.....	50
E. Pengembangan Ekonomi Umat Melalui BUMDes.....	53

BAB III PERAN BUMDES BAGI PERMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI DESA SEI CABANG BARAT KALIMANTAN TENGAH

A. Gambaran Umum Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.....	59
B. Implementasi BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah	63

BAB IVPERAN BUMDES BAGI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI DESA SEI CABANG BARAT KALIMANTAN TENGAH

A. Analisis Implemtasi BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.	89
1. Analisis Perencanaan BUMDes bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah	89
2. Analisis Pelaksanaan BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah	98
3. Analisis Evaluasi BUMDES bagi Peremberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah	119
B. Analisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peran BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah	123

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	131
B. Saran.....	132

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengandung pengertian bahwa hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Namun pada realitanya pembangunan yang sudah berjalan saat ini secara keseluruhan belum dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia hingga lapisan bawah. Sehingga, menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan di Indonesia pada September 2013 tercatat sebesar 11,47 persen atau 28,55 juta orang.¹

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang penting dari dahulu sampai sekarang, walaupun secara persentase mengalami penurunan, tetapi dari segi jumlah tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran tersebut.

Salah satu cara yang ditempuh mengatasi kemiskinan dan pengangguran adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan komunitas pedesaan, sehingga mampu mengenali potensi-potensi yang ada, mendayagunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam

¹ Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, Jakarta, BPPS, 2016

pemeliharaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci dari setiap upaya pembangunan, sebab pembangunan tanpa partisipasi masyarakat hanya menimbulkan ketergantungan masyarakat sehingga mereka menjadi obyek dalam proses pembangunan.²

Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya dalam memberdayakan masyarakat pedesaan untuk menanggulangi kemiskinan dengan keterpaduan dan keberlanjutan, diantaranya adalah BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.³

Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah sebagai desa dengan tipologi desa pesisir yang sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan menjadikan penghasilan tidak menentu, sedangkan ketika masyarakat ingin beralih menjadi pedagang dan pengusaha kecil mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan modal dan mengalami kesulitan dari hasil barang dagangannya, hal inilah yang juga menjadikan masih banyak keluarga miskin di Desa Sei Cabang Barat.

Program BUMDes sebagai bentuk penguatan terhadap

² Rahayu Kristiniati dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo", *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 2, September 2014, h. 103-220

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/BUMDes> diakses pada tanggal 19 Maret 2018

lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. melalui memperdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan tridaya. Khusus di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah program infrastruktur dilakukan melalui program padat karya yang memanfaatkan tenaga warga Desa Sei Cabang Barat, program sosial dilakukan dengan bantuan bedah rumah, penyuluhan, pelatihan dan kesehatan, sedangkan program ekonomi diwujudkan dengan kegiatan “Pinjaman Bergulir”, yaitu pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah untuk memulai usaha dengan pendampingan berkala dan suku bunga yang murah sehingga masyarakat yang semula menganggur menjadi ada ruang untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan perekonomian tidak hanya tergantung pada suami.

Program BUMDes yang sampai sekarang berjalan di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah adalah kegiatan “Pinjaman Bergulir” dimana setiap kelompok usaha diberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha, namun dari 26 kelompok yang mengikuti program ini hanya ada 9 kelompok atau 35 % yang mampu melunasi pinjaman modal tersebut, sedangkan 17 kelompok 65% tidak mampu melunasi dengan berbagai masalah diantaranya tidak dimanfaatkannya modal tersebut untuk usaha produktif oleh anggota kelompok, kredit macet karena mengalami kerugian usaha, persaingan usaha yang tidak sehat sehingga keuntungan yang diperoleh dalam usaha tidak

maksimal, penggunaan modal usaha yang digunakan untuk kegiatan melaut dengan penghasilan menentu menjadikan tidak mampu secara rutin membayar dan ban lainnya.

Berbagai problematika tersebut tentunya menjadikan program BUMDes yang semula mengarah kepada pengentasan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran dan usaha penanaman modal yang diberikan akan berhenti karena perputaran modal tidak mampu berjalan secara efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “BUMDES dan Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah:

1. Bagaimana peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran BUMDES bagi

peremberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

2. Untuk menganalisis perspektif ekonomi Islam terhadap peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khazanah keislaman dan keilmuan ekonomi Islam tentang peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan tentang pentingnya pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

- b. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan tentang pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah khususnya dalam perspektif ekonomi Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan

menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini antara lain:

1. Penelitian Varkhatun Wafiyah dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Mengatasi Pengangguran di Desa Sumberejo Mranggen”. *Hasil penelitian menunjukkan* partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri dalam mengatasi pengangguran di Desa Sumberejo Mranggen dilakukan pertama dengan ikut terlibat dalam perencanaan dengan ikut serta memberikan masukan terhadap program PNPM mandiri dan mengidentifikasi masyarakat yang layak mendapat bantuan program, mengikuti aturan pencairan pinjaman dan merencanakan kemajuan usaha yang dilakukan kelompok, kedua ikut melaksanakan program kerja dengan mengikuti aturan yang telah disepakati dan melakukan kerja kolektif kelompok usaha dalam mengembangkan usaha yang dilakukan dalam kelompok dengan memanfaatkan pinjaman sebaik mungkin bagi pengembangan usaha dan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai kesepakatan dengan pengelola PNPM mandiri, ketika melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan dan menerima pengawasan dari pengawas UPK dan saling tukar pikiran dengan pengawas dan kelompok untuk kemajuan bersama, setiap kelompok bertanggung jawab dengan pinjaman yang telah diterima dan jika salah satu dari anggota kelompok tidak bisa mengembalikan maka akan ditanggung seluruh kelompok tersebut

sehingga proses koordinasi, saling mengevaluasi dan saling mengawasi intens dilakukan oleh kelompok usaha yang mendapatkan bantuan program PNPM mandiri.⁴

Penelitian Varkhatun Wafiyah mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu program pemberdayaan masyarakat, namun penelitian di atas hanya mengkaji tentang partisipasi masyarakat sedangkan penelitian yang peneliti kaji membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

2. Penelitian Garnies Lellyana Sagita yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)”. Hasil menunjukkan asil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini adalah bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDes bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDes

⁴ Varkhatun Wafiyah, “Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Mengatasi Pengangguran di Desa Sumberejo Mranggen”, Skripsi, Semarang: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Semarang. 2017

merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.⁵

Penelitian Garnies Lellyana Sagita mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang BUMDes dan pemberdayaan masyarakat, namun penelitian di atas hanya mengkaji secara umum sedangkan yang peneliti lakukan juga dipandang dari perspektif ekonomi Islam, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

3. Penelitian Rufaidah Aslamiah “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Penggung Lestari, Sewun, Bantul, Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Panggung Lestari berperan sebagian lembaga pelayanan berbasis masyarakat, pemerintah BUMDes memiliki tiga peran, antara lain: (1) Penyebaran informasi dan mendorong pembuatan jaringan, (2) Berperan penting dan vital dalam memungkinkan, dan berperan minimal dalam pemberian, (3) Realokasi sumber daya, karena adanya berbagi tingkat sumber daya yang tersedia bagi masyarakat untuk pembangunan. Kemudian ditemukan beberapa dampak dari adanya KUPAS, yaitu: (1) permasalahan sampah dapat dikelola dengan baik, (2) Terpenuhi

⁵ Garnies Lellyana Sagita, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)”, Skripsi, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

kebutuhan kesehatan dan ekonomi masyarakat, dan (3) Kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.⁶

Penelitian Rufaidah Aslamiah mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang BUMDes dan pemberdayaan masyarakat, namun penelitian di atas hanya mengkaji secara umum sedangkan yang peneliti lakukan juga dipandang dari perspektif ekonomi Islam, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu “pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki”.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisisnya serta menafsirkannya secara kualitatif. Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk

⁶ Rufaidah Aslamiah, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Penggung Lestari, Sewun, Bantul, Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan kalijaga, 2017.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004. h.10

simbol-simbol atau kerangka.⁸ Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti mencoba memahami dan menggambarkan keadaan subyek yang diteliti dengan detail dan mendalam terutama terkait dengan peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen dan wawancara dengan pengelola BUMDES dan masyarakat Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah .

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

⁸ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, h. 174

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h.91

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam studi literatur peneliti menelaah buku-buku, karya tulis, karya ilmiah maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan. Adapun untuk data empirik, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. *Observasi*

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹ Jenis observasi dalam penelitian ini adalah *non participant observer*, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari berada di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah. Data dari observasi akan mampu menjelaskan peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

b. *Interview* atau wawancara

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2004, h. 45

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹² Penelitian yang dilakukan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.

Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah. Obyek yang diwawancarai dalam penelitian ini, adalah pengelola BUMDES, masyarakat dan kepala Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.¹³

Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengetahui data-data yang berkaitan dengan gambaran umum pesantren dan

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 132

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 135

dokumen-dokumen yang terkait dengan gambaran umum Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dan dokumen BUMDES, jenis dokumentasinya berupa profil dan perangkat kerja, sistem kerja, program kerja dan laporan keuangan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.¹⁴ Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian di atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian. Pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.¹⁵

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari *implikasi*.¹⁶

Metode *deskriptif* yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 103

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 103-104

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, h. 6-7.

data secara *induktif*, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan *responden* menjadi *eksplisit*, dapat dikenal dan *akuntabel*, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara *eksplisit* sebagai bagian struktur *analitik*¹⁷

Analisis ini peneliti gunakan untuk perspektif ekonomi Islam terhadap peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kerangka teoritik, yang berisi tiga sub bahasan, pertama tentang BUMDes terdiri dari, pengertian BUMDes, fungsi BUMDes,

¹⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 10

tujuan BUMDes, prinsip BUMDes dan program BUMDes kedua tentang pemberdayaan ekonomi umat terdiri dari pengertian pemberdayaan ekonomi umat, cakupan pemberdayaan ekonomi umat, indikator pemberdayaan ekonomi umat, tujuan pemberdayaan ekonomi umat dan karakteristik pemberdayaan ekonomi umat. Sub bab ketiga tentang ekonomi Islam meliputi pengertian ekonomi islam, unsur-unsur ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam

Bab III Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah. Ada tiga sub bab bahasan. Sub bab pertama tentang gambaran umum Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah. Sub bab kedua tentang pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

BABIV Berisi tentang analisis perspektif ekonomi Islam terhadap peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

BAB V Merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai penegasan jawaban atas problematika yang diangkat dan asumsi-asumsi yang pernah diutarakan sebelumnya, kemudian akan dilengkapi dengan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

Peran adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁹ Peran dalam penelitian ini adalah tugas yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan ekonomi umat.

B. BUMDes

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).²⁰

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32

¹⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 115

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 751.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, h. 3

tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.²¹

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pasal 2 menyebutkan pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau

²¹ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, No.3 September-Desember, 2013, h. 356

pelayanan umum yang di kelola oleh Desa dan / atau kerja sama antar-Desa.²²

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 Tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Paser dalam pasal 6 menyebutkan Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berBadan Hukum, bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Dalam pasal selanjutnya pasal 7 menyebutkan Tujuan Pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya termasuk kesempatan berusaha dan lapangan kerja.²³

Selain itu BUMDES juga merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari hulu (*up-stream*) sampai kesektor hilir (*down-stream*) dari aktivitas pengembangan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa.²⁴

Dengan demikian, BUMDES yang professional, mandiri, dan

²² Khairul Agusliansyah, “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 4, 2016: 1785-1796*

²³ Khairul Agusliansyah, “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 1785-1796

²⁴ A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru: UNRI Press, 2001, h. 52

memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonomi.

2. Fungsi BUMDes

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni : unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada di dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam
- b. Unit usaha sector riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan, fotocopy, sablon, pertanian, peternakan, dan perikanan.²⁵

3. Tujuan BUMDes

Adapun tujuan yang ingin dicapai BUMDes dalam pembangunan desa yaitu:

- a. Menetapkan kelembagaan perekonomian desa
- b. Menciptakan kesempatan berusaha
- c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa

²⁵ A.Z. Fachri Yasin, dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi...* h. 85.

- f. Memberikan kesempatan usaha
- g. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan.²⁶

Selain itu tujuan program dana bergulir ini adalah untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada unit usaha ekonomi untuk peningkatan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif. Disamping mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi melalui penyediaan dana bergulir yang bersifat khusus. Berikutnya mampu meningkatkan kesadaran kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya dirinya.

Kelompok program pemberdayaan masyarakat seperti BUMDes dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. BUMDes Mandiri pada dasarnya berperan terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi:

- a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
- b. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.

²⁶ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," h. 356

Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir.

- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.²⁷

Arah program ini untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah, selain itu guna lebih mendorong terjadinya proses transformasi sosial ekonomi penduduk miskin dan usaha ekonomi lemah ke arah yang lebih bertanggung jawab dan lebih pro aktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif, sasaran program ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah melalui: peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan dan menumbuhkan dan pengembangan usaha produktif.²⁸

Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.²⁹

4. Prinsip BUMDes

²⁷ Bambang Triyono, dkk, *Evaluasi PNPM Mandiri, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral*, Bappenas, 2013, h. 2

²⁸ A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi...*, h. 88.

²⁹ Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988, h. 216

BUMDes dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. PNPM Mandiri pada dasarnya berperan terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi:

- a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
- b. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir.
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.³⁰

Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh BUMDes yakni:

- a. Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya

³⁰ Bambang Triyono, dkk, *Evaluasi PNPM Mandiri*, h. 2

- b. Otonomi Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola
- c. Desentralisasi Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
- d. Berorientasi pada Masyarakat Miskin Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
- e. Partisipasi / Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
- f. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
- g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin
- h. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legas maupun administratif

- i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas
- j. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
- k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbang-kan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini.³¹

5. Program BUMDes

Program kegiatan BUMDes meliputi :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal)
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas / keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)

³¹ Bambang Triyono, dkk, *Evaluasi PNPM Mandiri*, h. 17-18

- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).³²

C. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak sedangkan kata Pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan.³³ Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Disusul kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah Frankfurt. Bermunculan pula konsep-konsep elit, kekuasaan, anti kemapanan, ideologi, pembebasan, dan *civil society*.³⁴

Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai depowerment dari sistem kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi dan militer). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berlandaskan idiil manusia dan kemanusiaan (humanisme).

³² Departemen Dalam Negeri, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta: 2008, h. 5

³³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 241-242

³⁴ Harry Hikmah, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama, 2006, h. 2

Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk power yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia. Aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan.³⁵

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat.³⁶ Sementara itu pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM, termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, konsep pemberdayaan (empowerment) dianggap merupakan antitesis dari konsep pembangunan (development). Konsep pembangunan lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat top down, elitis dan jauh dari nilai-nilai keadilan, sedangkan pemberdayaan lebih bersifat bottom up,³⁷ lebih mengedepankan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Sikap aspiratif

³⁵ Harry Hikmah, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, h. 4

³⁶ Harry Hikmah, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, h. 5

³⁷ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bandung: Penerbit Humaniora, 2006, h. 6

iniilah yang dimaknai sebagai upaya menggali dan menemukan persoalan dari masyarakat sendiri. Artinya, masyarakatlah yang menemukan permasalahannya sendiri dan kemudian memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut.

Sedangkan Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan/ pemerintah) dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual (jasmani dan rohani) dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.³⁸ Ekonomi adalah sesuatu yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan sarana-prasarana pemenuhannya (ilmu yang membahas tentang produksi dan kualitasnya serta bagaimana menentukan dan memperbaiki sarana-prasarananya).³⁹

Umat atau masyarakat, secara etimologis masyarakat artinya pergaulan. Dalam bahasa latin *socius* dan berubah menjadi kata sosial yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan hidup.⁴⁰ Secara terminologi, sosial dalam pandangan sosiologi berarti wadah pergaulan hidup bersama manusia yang juga berfungsi sebagai tempat persemaian dan

³⁸ M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya Bekerjasama Dengan P3EL UII, 1993, h. 3.

³⁹ Tagyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, 1996, h. 16.

⁴⁰ Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadah, 2014, h. 77

pertumbuhan budaya manusia sebagai mahluk sosial.⁴¹

Dalam masyarakat terdapat simbol-simbol, nilai-nilai dan norma-norma, aturan-aturan dan tingkah laku yang bersifat normatif yang harus dipertahankan dan ditaati bahkan diciptakan manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun maksud penulis, masyarakat dalam penelitian ini adalah warga masyarakat terlibat dalam program BUMDes.

Masyarakat yang tingkat sosial ekonominya tinggi atau kaya secara teoritis mereka tidak mengalami hambatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dengan demikian terpenuhilah kebutuhannya, karena alat atau sarana untuk mendapatkan kebutuhan tersebut ada dan tersedia, sehingga dapat menambah semangat dan gairah hidup dalam usahanya untuk meraih prestasi yang cita-citakan.

Sedangkan keluarga dimana tingkat sosial ekonominya menengah/sedang, maka dengan ketat mengatur ekonomi rumah tangga dan memilih serta mengutamakan kebutuhan keluarga yang pokok dan dianggap penting, dengan demikian berarti ruang gerak atau kesempatan anak untuk mendapatkan kebutuhannya terbatas, yang penting-penting saja dan pas, tidak berlebihan yang wajar dan sederhana.⁴²

Jadi, bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

⁴¹ Syafari Imam As'ari, *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2011, h. 32

⁴² Eko Budiharjo, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Bandung: Alumni, 2006, h. 51

2. Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Michael Sheraden mengatakan pemberdayaan ekonomi umat setidaknya mencakup tiga bidang pemberdayaan yaitu:⁴³

Pertama, aset manusia (*human asset*) berkaitan erat pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusianya. Humman capital ini termasuk pada golongan aset tidak nyata. Humman asset secara umum meliputi intelegensia, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Usaha-usaha untuk meningkatkan human asset ini biasanya dilakukan dengan berbagai program yang bersifat kualitatif seperti program pelatihan dan keterampilan dalam bentuk kursus-kursus, penyuluhan, yang kesemuanya bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada akhirnya menghasilkan output pada peningkatan kualitas SDM.

Kedua, pemberdayaan aset modal keuangan (*finansial asset*), meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi dan komponen produksi lainnya. Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi para pelaku perekonomian adalah sulitnya mendapatkan modal untuk kredit usaha. Ketidakmampuan dan ketidak pastian mereka dalam memenuhi setiap persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan formal seperti bank menjadikan sulitnya dana usaha terealisasikan. Para pengusaha kecil pada umumnya tidak memiliki asset yang cukup untuk menjamin kepada pihak bank.

⁴³ Ismet Firdaus dan Ahmad Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Ndesa Bojong Indah, Parung*, Jakarta: Dakwah Press, 2008, h. 226

Ketiga, pemberdayaan aset sosial (*sosial asset*). Aset sosial meliputi keluarga, teman, koneksi atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit dan tipe aset lainnya.

3. Indikator Pemberdayaan Ekonomi Umat

Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain: ⁴⁴

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti pasar, tempat hiburan, dan lain-lain. Tingkat mobilitas ini di anggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan individu maupun keluarga sehari-hari. Seorang dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli komoditas atau barang-barang sekunder atau tersier, seperti TV, berlangganan koran, dan lain-lain.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama pasangan mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.

⁴⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h. 64-66

- f. Kesadaran hukum politik: mengenai nama salah seorang anggota DPRD setempat, mengetahui pentingnya memiliki akta nikah.
 - g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat.
 - h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki rumah, tanah, aset produktif.
4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk mendukung keterjaminan, kesempatan, dan keberdayaan melalui:⁴⁵

- a. Pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial.
- b. Penguatan akuntabilitas dan inklusifitas kelompok-kelompok masyarakat.
- c. Peningkatan partisipasi berbasis luas.
- d. Perluasan akses masyarakat terhadap informasi dan jaringan sosial.
- e. Penyempurnaan pemerintah, lembaga dan kebijakan pada skala local dan nasional sehingga responsive terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Adapun target pengembangan masyarakat/peningkatan kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan atau empowerment agar anggota masyarakat terlibat dalam proses produktif yang didasarkan pada kesetaraan atau *equity*, dan keterjaminan dan security, keberlangsungan atau sustainability, kerjasama atau cooperation, bila pemberdayaan atau kesetaraan, keterjaminan, keberlangsungan dan

⁴⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 2

kerjasama dapat berjalan secara simultan maka sasaran kesejahteraan dapat tercapai.⁴⁶

5. Karakteristik Pemberdayaan Ekonomi Umat

Karakteristik pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi ciri atau karakter pemberdayaan yang berdasarkan tiga hal utama yang bersifat adaptif terhadap masyarakat, yaitu:⁴⁷

Pertama, berbasis masyarakat (*community based*), artinya masyarakat bertindak sebagai pelaku/subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pemberdayaan ekonomi. Masyarakat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan yang diperlukan serta pelaksanaannya. Keputusan yang diambil merupakan kelurusan bersama (*selective decision*).

Kedua, berbasis sumber daya setempat (*local resources based*) artinya program ini berdasarkan pada sumber-sumber yang tersedia pada daerah tersebut. Ketiga, berbasis kelanjutan (*sustainable*) artinya program yang dirancang harus dapat berfungsi sebagai motor penggerak awal, tidak berhenti pada akhir suatu program. Agar hal tersebut dapat tercapai diperlukan strategi, perencanaan dan pelaksanaan yang tepat guna.

Jadi inti pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mengarahkan dan mendorong perubahan struktural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Dengan

⁴⁶ Asep Usman Ismail dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim: Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Badak Putih dan Kampung Satu Duit*, Jakarta: Dakwah Press, 2007, h. 54

⁴⁷ Ismet Firdaus dan Zaky, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa*, h. 227

demikian, pelaku ekonomi masyarakat mampu menikmati yang dihasilkan dan seterusnya mampu menghasilkan san bermanfaat serta berkelanjutan.

6. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses motivasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi, demokratisasi, pembelajaran dan pengalaman sosial serta tujuan berupa upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga rakyat, organisasi dan komunitas mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya Selanjutnya tahapan dalam pemberdayaan adalah sebagai berikut: Tahap pertama adalah penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, tahap kedua adalah pengkapasitasan (*capacity building*) baik manusia, organisasi, atau sistem nilai atau memampukan (*enabling*) dalam arti untuk memberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu dan tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam arti sempit, pada tahap ini kepada target diberi daya, kekuasaan, otoritas atau peluang.⁴⁸

⁴⁸ Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, Bandung, Unpad Pres, 2016, h. 65-66

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) dan dalam tahap selanjutnya muncul istilah *driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakan masyarakat. Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy sebagaimana dikutip oleh Rahman Mulyawan mengandung makna tiga pengertian yaitu *enabling*, *empowering*, dan *maintaining* sebagai berikut:

- a. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
- b. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan *skill* dan kemampuan manajerial.
- c. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, h. 66-67

Menurut Kartasmita (oleh Rahman Mulyawan, upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperllukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberda yaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan tarap pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi,

jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan tempat terkonsentrasinya penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program yang umum yang berlaku untuk semua tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*).

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat berdasar sifatnya. Dalam rangka ini, adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan

dengan pihak lain.⁵⁰

Berdasarkan pendapat di atas pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yaitu pertama penyadaran, kedua *enabling atau capacity building*, ketiga *empowering* dalam arti sempit dan keempat adalah *protecting atau maintining*. Dimensi *enabling atau capacity building* menurut pendapat para pakar diatas pada dasarnya menciptakan susana iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal sehingga masyarakat bisa secara mandiri untuk melaksanakan keinginannya dengan indikator dorongan meningkatkan produktivitas kerja, keinginan kuat untuk maju, pemenuhan kebutuhan, pemberian insentif berupa tambahan uang atau barang untuk meningkatkan gairah kerja, harapan berupa keinginan untuk penghidupan yang layak dan lebih baik, memberikan informasi, memberikan pemahaman, menumbuhkan kesadaran dan menumbuhkan inisiatif.⁵¹

Dimensi *empowering* dalam arti sempit adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Indikator *empowering* adalah peningkatan pengetahuan tentang pembangunan, peningkatan keterampilan penggunaan teknologi, kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah, kesempatan

⁵⁰ *Ibid*, h. 67-68

⁵¹ *Ibid*, h. 69

menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan, akses bantuan pemahaman hukum, kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal, penggunaan teknologi yang lebih maju, terbukanya lapangan kerja, penyediaan informasi kerja sama dengan pihak lain, pembangunan fisik berupa jalan, dan listrik, pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan lembaga pendanaan atau permodalan, ketersediaan lembaga pelatihan, pembangunan sarana perekonomian seperti pasar.⁵²

Dimensi *protecting* atau perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Indikator *protecting* melindungi masyarakat yang lemah, miskin, dan yang tidak mempunyai lahan, melindungi pihak yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon), melindungi kaum lemah dari berbagai bentuk pemerasan, kemudahan dan keringanan dalam membayar utang atau kredit, biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, melindungi semua pihak yang terlibat dalam program, pengaturan upah yang layak, aturan jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang merugikan golongan yang lemah, aturan tidak diskriminatif, persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan,

⁵² *Ibid*, h. 69

persaingan seimbang untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, akses yang sama untuk mendapatkan informasi atau keterangan pemerintah, mencegah monopoli barang dan jasa, membentuk pergaulan antar sesama anggota masyarakat, penduduk yang tersebar menjadi memusat, penduduk yang tertutup menjadi membuka diri, meningkatkan hubungan dengan pemerintah, pemberitahuan tentang kegiatan pemerintah, menjalin komunikasi antar kelompok.⁵³

Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin, tiga aspek pemberdayaan dapat dilakukan melalui lima strategi yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan

⁵³ *Ibid*, h. 69-70

yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.⁵⁴

Dalam ajaran Islam baik sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maupun sirah sebagai bukti penerapan dalam kenyataan masyarakat terdapat aturan dan solusi bagi masyarakat lemah tersebut. Strategi yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah (*dhu'afa*) tersebut agar kehidupan mereka tidak lemah, terlantar, menderita, sengsara, dan terindas antara lain :

⁵⁴ Muhammad Munir, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 34-36

a. Sistem Jaminan Sosial

Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat antara umat dengan umat lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan lainnya secara timbal balik.⁵⁵

b. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu strategi untuk mencari solusi terhadap permasalahan lahan-lahan yang sedang dihadapi masyarakat lemah (*dhu'afa*), dalam kaitan dengan bantuan sosial ini, Rasul SAW ketika sedang duduk-duduk bersama sahabat beliau, didatangi rombongan orang yang berpakaian hampir telanjang dan compang-camping. Tiba-tiba wajah Rasul berubah melihat penderitaan mereka, oleh karena itu, setelah selesai melaksanakan shalat berjamaah, beliau menganjurkan agar setiap orang yang hadir untuk mengeluarkan sedekah berupa sandang atau pangan. Maka berbondong-bondonglah para sahabat menyumbangkan apa yang mereka miliki. Kemudian Rasul SAW membagi-bagikan sedekah itu kepada orang-orang *dhu'afa* tadi.⁵⁶

c. Perlindungan

Salah satu solusi untuk membantu masyarakat lemah (*dhu'afa*) adalah dengan memberikan perlindungan, baik dalam bentuk

⁵⁵ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 2004, h. 79-80

⁵⁶ Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, 2007, h. 79

perlindungan jiwa, harta, harga diri, hak-hak dan masa depan. Jiwa mereka perlu mendapat perlindungan agar tidak ada orang yang melakukan tindakantindakan yang mengakibatkan diri mereka terganggu dan menjadi korban.⁵⁷

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, termasuk untuk orang-orang lemah (*dhu'afa*) untuk menanggulangi kebodohan dan keterbelakangan mereka. Kewajiban menuntut ilmu ini ditujukan bagi setiap orang, baik orang-orang lemah (*dhu'afa*) maupun bukan. Jika kewajiban ini dilaksanakan, ditunjang dengan bantuan orang lain dalam hal pembiayaan dan fasilitas lainnya, maka tidak akan ada orang-orang lemah (*dhu'afa*) yang akan mengalami nasib berada dalam kebodohan dan keterbelakangan. Dengan bantuan pendidikan, termasuk pembiayaannya diharapkan tingkat kebodohan, dan keterbelakangan di kalangan orang-orang lemah (*dhu'afa*) dan *mustadh'afin* ini berkurang, bahkan dapat dihapuskan. Disamping itu, melalui bantuan ini diharapkan tingkat pendidikan mereka menjadi lebih baik dan maju. Karena bila tingkat pendidikan mereka maju, maka kesejahteraan hidup mereka pun akan meningkat dan maju. Dengan demikian, berarti bantuan pendidikan merupakan langkah strategis dalam memajukan dan mensejahterakan kehidupan orang-orang lemah (*dhu'afa*).⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, h. 74

⁵⁸ *Ibid*, h. 75

Dalam hubungannya pemberdayaan dengan pembangunan manusia yang disebut sebagai konsep holistik menurut penulis mempunyai unsur-unsur penting yaitu peningkatan produktifitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan serta pemberdayaan manusia. Selanjutnya upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana kondusif. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti; kerja keras, hemat, keterbukaan, bertanggungjawab, dan lain-lain, yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa arab, sering dinamakan dengan Al-Mu'amalah Al-Madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan mengenai kebutuhan hidupnya. sering juga dinamai al-iqtishad, yang artinya hemat atau sederhana, karena ia mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan

secermat-cermatnya.⁵⁹

Menurut Monzer Kahf ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi dengan demikian bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.⁶⁰

Sementara pengertian Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan *human well-being* (manusia menjadi lebih baik) melalui pengalokasian pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidakseimbangan ekologi. Ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.⁶¹

Muhammad Syauqi Al-Fanjari sebagaimana di kutip Havis Aravik merumuskan pengertian ekonomi Islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi. Dari rumusan itu, ia menyimpulkan bahwa ekonomi Islam mempunyai dua bagian, yaitu:

Pertama, bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan

⁵⁹ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016, h. 2

⁶⁰ Monzer Kahf, *the Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System: Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 2

⁶¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, h. 5-7

prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang dibawah nash-nash al-Qur'an dan sunnah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslim di setiap tempat dan zaman atau sering disebut dengan dasar-dasar ekonomi illahiyah (usul illahiyah).

Kedua, bagian yang berubah (*Al-Mutaghiyar*), bagian ini berkaitan dengan penetapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah. Artinya, bagian ini merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disingkatkan oleh para ulama dan dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis.⁶²

Sementara Muhammad dan Alimin menyatakan bahwa ilmu ekonomi dalam aspek kajian keilmuan Islam, berada dalam kajian fikih (hukum Islam) karena hukum fikih terdapat hukum *takfili* atau hukum *wadh'i*, yang selanjutnya memberikan sanksi atau akibat hukum duniawi dan ukhrowi, yaitu sanksi religi berupa halal dan haram, dosa dan pahala, serta sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya, seperti dewan hisbah dan peradilan.⁶³

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi dengan demikian bidang garapan ekonomi adalah salah satu

⁶² Havis Aravik, *Ekonomi Islam...*, h. 2-3

⁶³ Havis Aravik, *Ekonomi Islam...*, h. 3

sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi berdasarkan atas ajaran-ajaran agama Islam.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁶⁴ Dalam hal ini antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling menyatu dan saling melengkapi, dalam artian bahwa di dalam kepentingan individu terdapat bagian kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi. Sistem ekonomi Islam juga menghendaki suatu organisasi, di mana hak-hak masyarakat mencapai keseimbangan⁶⁵. organisasi ini harus mempunyai peran sebagai fasilitator dalam memenuhi hak-hak masyarakat seperti adanya swadaya masyarakat. Di mana sistem ekonomi Islam itu sendiri merupakan sistem yang integral antara faktor produksi, distribusi dan konsumsi.⁶⁶

Para ahli menyebutkan secara beragam, prinsip-prinsip yang membangun ekonomi Islam. Adiwarmanto Azwar Karim menyebutkan tiga prinsip ekonomi Islam yaitu *Multitype Ownership* (kepemilikan multi jenis), *Freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha), dan *Social Justice* (keadilan sosial).⁶⁷

a. *Multitype Ownership* (kepemilikan multi jenis),

⁶⁴ Saifudin Prawiranegara, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: tp., t.th., h. 19

⁶⁵ Tahir Ibrahim, *Pembahasan Ekonomi Islam Marx dan Keynes*, Jakarta: tp., t.th., h. 51

⁶⁶ Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, konsumsi adalah pemanfaatan barang dan jasa, sedang distribusi adalah penyaluran terhadap barang dan jasa. A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, tth., h. 28.

⁶⁷ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 17

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep multitype ownership. Berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang hanya mengakui kepemilikan swasta, dan sistem kapitalis yang hanya mengakui kepemilikan individu. Dalam sistem Ekonomi Islam mengakui kepemilikan baik swasta, negara atau campuran.

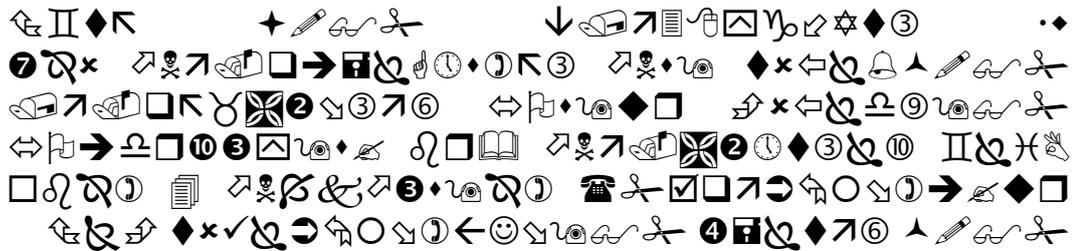
b. *Freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha)

Prinsip ini lahir dari penggabungan empat nilai nurbuwwah (siddiq, amanah, fatonah dan tabligh) dan dua landasan ekonomi Islam lainnya yaitu keadilan dan khilafah. *Freedom to act* bagi setiap muslim akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam dengan syarat tidak ada distorsi (kezaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan menghayati nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

c. *Social Justice* (keadilan sosial).

Gabungan dari nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan miskin. Jika keseimbangan ini bisa tercapai maka kesejahteraan sosial yang diharapkan masyarakat juga tercapai pula. Sebab salah satu kendala tercapainya kesejahteraan

adalah kemiskinan.⁶⁸ Kemiskinan ini terjadi karena tidak terciptanya keadilan di masyarakat seperti pendapatan yang tidak merata dan kepemilikan harta yang kurang berfungsi sosial. Allah berfirman:



Artinya: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil (Al-Mumtahanah: 8)⁶⁹

Sementara prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Fazlur Rahman terdiri dari sembilan prinsip. Dimana sembilan prinsip ini menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalisa dan sosialis.

3. Ciri-Ciri Ekonomi Islam

Dalam aplikasi dan implementasinya, prinsip-prinsip ekonomi Islam diatas menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri ekonomi Islam, yakni sebagai berikut:

Pertama, pemilikan. Sebagai khalifah, manusia berkewajiban untuk mengelola alam guna kepentingan umat manusia, maka ia, harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam kepada Allah SWT dalam melaksanakan tugas, lambat laun is dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja

170 ⁶⁸ Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta : Lantabora, 2005, h.

⁶⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2015, h. 439

guna memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusak dan membakarnya, ataupun menelantarkannya, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah dan juga merupakan titipan dari Allah SWT.

Kedua, pelaksanaan perintah berlomba-lomba dalam berbuat kabaikan (*Fastabiqul Khairat*) dalam bentuk anjuran untuk senantiasa bersedekah, baik kepada seseorang maupun lembaga-lembaga sosial (panti asuhan, yatim piatu dan lain sebagainya).

Ketiga, thaharah atau kebersihan. Tidak hanya ditujukan kepada individu tertentu, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah. Kebersihan juga bertujuan agar alam sebagai tempat manusia memenuhi kebutuhan tidak rusak, dan tidak mengganggu aktifitas ekonomi yang dilakukan manusia.

Keempat, produk barang dan jasa harus halal. Kehalalan tersebut baik dari aspek memperoleh input, proses maupun outputnya. Oleh karenanya, setiap masyarakat dituntut untuk senantiasa hati-hati dan begitu saja langsung percaya terhadap label yang mengatasnamakan kehalalan suatu produk. Tidaklah dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal maupun sebaliknya.

Kelima, keseimbangan (tawazun/balance) Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupan di dunia. Dalam

mengusahakan kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, dan tidak boleh juga terlalu kikir. Jangalah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, dan juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rezeki. Ia harus minta tolong kepada Allah SWT dengan cara sabar dan mendirikan sholat.

Keenam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan merupakan kejahatan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Monastisme dan asketisisme dilarang.

Ketujuh, upaya tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. Upah juga harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka menjadi kering, agar para pekerja tidak menunggu dan mengakibatkan menderita. Selain itu, senantiasa menjaga agar harga dapat rendah karena efisiensi, dan tak ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja.

Kedelapan, kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dalam timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya. Kejujuran sangat menjunjung tinggi, dan ketidakjujuran merupakan tindakan tidak terpuji dan sangat dicela dalam Islam.

Kesembilan, kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat

menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri yang indah barang siapa berbuat baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang siapa kikir, maka sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri.⁷⁰

Tujuan ekonomi Islam di atas jelas sangat berbeda dengan tujuan ekonomi kapitalis dan komunis. Pada ekonomi komunis, kemakmuran yang dicapai hanyalah kemakmuran duniawi, kemakmuran di akhirat diabaikan. Demikian juga pada sistem ekonomi kapitalis, kemakmuran yang dicita-citakan hanyalah kemakmuran duniawi. Sedangkan dalam perekonomian Islam, kemakmuran yang hendak diraih meliputi kemakmuran duniawi dan kemakmuran ukhrowi.

E. Pengembangan Ekonomi Umat Melalui BUMDes

BUMDes adalah gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

Melalui BUMDes dilakukan harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam

⁷⁰ Havis Aravik, *Ekonomi Islam...*, h. 21-24

upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan, dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai menjadi kunci keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan ekonomi umat tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Untuk harmonisasi dan sinergi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, pada bagian ini akan diuraikan mengenai kategori program, komponen, dan ruang lingkup kegiatan dalam BUMDes.⁷¹ Jika masyarakat dilibatkan mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Dengan dibukanya kesempatan berpartisipasi, warga menjadi lebih memiliki perhatian terhadap permasalahan yang ada di lingkungannya dan memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat berkontribusi untuk ikut mengatasinya. Ada empat kegiatan yang menunjuk partisipasi dalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal

⁷¹ Bambang Triyono, dkk, *Evaluasi*, h. 54

dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak, karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

Jenis usaha badan usaha milik desa dalam mengembangkan ekonomi umat diantaranya:

1. Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDES yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.

2. Bisnis Uang

BUMDES menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3. Bisnis Penyewaan

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

4. Lembaga Perantara

BUMDes menjadi "*lembaga perantara*" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5. Trading/perdagangan

BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

6. Usaha Bersama

BUMDes sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.⁷²

Pengembangan ekonomi umat melalui BUMDes dalam setiap kegiatan usahanya pada dasarnya dilakukan tiga tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah

⁷² <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

ditentukan. Dalam hal ini adalah merencanakan usaha yang akan dilakukan oleh anggota BUMDes dan perencanaan cara kerja dalam usaha tersebut

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan upaya perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan, dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. BUMDes dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan bekal kemampuan pengelolaan usaha yang telah diberikan oleh pengurus BUMDes

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan pengadaan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi dan memberikan ganjaran.⁷³ Evaluasi pengembangan ekonomi umat melalui BUMDes dilakukan setiap kinerja yang dilakukan oleh anggota untuk diberikan perbaikan-perbaikan.

Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan BUMDes yaitu dengan adanya pemerataan sumbangan masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, ketrampilan, buah pikiran dan atau beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga

⁷³ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Manajemen*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005, hl. 4

masyarakat. Partisipasi berikutnya partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yang sangat diperlukan bukan saja agar tujuan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan partisipasi terakhir adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan karena tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan, juga partisipasi dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah diselesaikan, untuk itu diperlukan kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka yang panjang. Apabila masyarakat sudah berpartisipasi dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan muncul kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan pada akhirnya mampu mengembangkan ekonomi masyarakat atau ummat.

BAB III

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM BUMDES DI DESA SEI

CABANG BARAT KALIMANTAN TENGAH

A. Gambaran Umum Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

Sei Cabang Barat adalah salah satu desa di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah yang mana satu kecamatan terdiri dari beberapa desa diantaranya Sungai Damar, Sungai Tabuk, Sungai Cabang Barat dan Desa Sungai Pesisir, dan Kecamatan Pantai Lunci yang terletak di desa Sungai Cabang Barat. Luas wilayah kecamatan Pantai Lunci adalah 804 Km²: batas wilayah kecamatan Pantai Lunci sebagai berikut:

1. Batas wilayah:
 - a. Utara : Kabupaten Sukamara
 - b. Selatan : Laut Jawa
 - c. Barat : Kecamatan Jelai
 - d. Timur : Kabupaten Kotawaringin Barat.⁷⁴
2. Keadaan geografis dan topografi desa
 - a. Geografis
 - 1) Letak dan luas wilayah

Desa Sei Cabang Barat merupakan daerah pesisir dari permukaan air laut Desa Sei Cabang Barat antara 0 sampai dengan

⁷⁴ Dokumentasi Profil Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, di kutip pada tanggal 21 Mei 2018

25 meter dan kemiringan 0 sampai 8 persen.

Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah merupakan salah satu empat desa di wilayah Kecamatan Pantai Lunci yang terletak 0,5 Km ke arah selatan dari Kecamatan Pantai Lunci dan terletak 40 Km ke arah utara ibukota Kabupaten Sukamara. Desa Sungai Cabang Barat mempunyai luas wilayah 98 Km².

2) Iklim

Iklim Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah sebagaimana desa-desa pada umumnya di wilayah Indonesia yaitu musim kemarau dan musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam, maupun pendapatan petani dan nelayan dari sektor kelautan dan perikanan di desa sungai cabang barat kecamatan Pantai Lunci.⁷⁵

b. Topografi

- 1) Luas kemiringan tanah : -
- 2) Datar : 9.072 Ha
- 3) Ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) : 6 meter.⁷⁶

3. Orbitasi Jarak

- a. Ibukota Kecamatan : 0,5 Km
- b. Ibukota Kabupaten : 40 Km

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

4. Jumlah Penduduk⁷⁷

Tabel 3.1
Jumlah Kependudukan

Kependudukan	Jumlah
A. Jumlah penduduk	2218
B. Jumlah KK	649
C. Jumlah Laki-laki	1139
1. 0-15 Tahun	345
2. 16-55 Tahun	632
3. Diatas 55 Tahun	76
D. Jumlah perempuan	1079
1. 0-15 Tahun	295
2. 16-55 Tahun	618
3. Diatas 55 Tahun	99

5. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Desa Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah mempunyai jumlah penduduk 2218 Jiwa, yang tersebar dalam 10 RT, dengan penyebaran penduduk sebagai berikut: ⁷⁸

Tabel 3.2
Jumlah Penyebaran Penduduk

RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	RT 06	RT 07	RT 08	RT 09	RT 10
162	154	132	295	321	329	251	178	199	197
Jiwa									

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Tabel 3.3
Kondisi Sosial Budaya Desa⁷⁹

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	E. Jumlah penduduk	2218	
	F. Jumlah KK		
	G. Jumlah Laki-laki	1139	
	4. 0-15 Tahun	345	
	5. 16-55 Tahun	632	
	6. Diatas 55 Tahun	76	
	H. Jumlah perempuan	1079	
	4. 0-15 Tahun	295	
	5. 16-55 Tahun	618	
6. Diatas 55 Tahun	99		
2	Kesejahteraan sosial		
	A. Jumlah KK Prasejahtera	50	
	B. Jumlah KK sejahtera	80	
	C. Jumlah KK kaya	20	
	D. Jumlah KK sedang	470	
E. Jumlah KK miskin	65		
3	Tingkat pendidikan		
	A. Tidak tamat SD		
	B. SD		
	C. SLTP		
	D. SLTA		
E. DILOMA/SARJANA			
4	Mata pencaharian		
	A. Nelayan	306	
	B. Petani	39	

⁷⁹ *Ibid.*

	C. Tukang kayu	11	
	D. PNS	66	
	E. Pedagang	12	
	F. Peternak	39	
	G. Perangkat desa	8	
	H. Pengrajin	15	
	I. Industri kecil	15	
	J. Lain-lain		
5	Agama		
	A. Islam	2184	
	B. Kristen	34	
	C. Protestan		
	D. Katolik		
	E. Hindu		
	F. Budha		

6. Sarana dan prasarana ekonomi
 - a. BUMDes “SINAR PANTAI”
 - b. BUMDes Gabungan kelompok tani “MAWAR”
 - c. BUMDes Kelompok nelayan “BERSERI”
 - d. BUMDes Kelompok nelayan “FAJAR HARAPAN”
 - e. BUMDes Kelompok peternakan “BAHAUM”⁸⁰

B. Implementasi BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

Implementasi BUMDES bagi Pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah merupakan kelanjutan dari program PNPM Mandiri dilakukan dengan tiga tahapan diantaranya:

⁸⁰ *Ibid.*

1. Perencanaan BUMDES bagi Pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

Perencanaan kegiatan BUMDES adalah rencana yang digunakan untuk merealisasikan rancangan yang telah disusun. Perencanaan dilakukan dengan berpegang pada:

- a. Mengidentifikasi dan menentukan jenis-jenis kebutuhan masyarakat
- b. Mengidentifikasi program karya yang dikembangkan masyarakat
- c. Mengembangkan ekonomi masyarakat.
- d. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- e. Membantu perekonomian masyarakat.
- f. Membuat penilaian yang disesuaikan program kerja yang telah dilakukan.⁸¹

BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah memberikan kepercayaan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk mengelola salah satu program dalam pencapaian tujuannya. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah organisasi non profit, namun LKM memiliki Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertujuan memperoleh laba untuk menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan “Pinjaman” kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Dalam pengelolaannya pemerintah membuat suatu program yang menunjang misi utama LKM yaitu

⁸¹ Wawancara dengan Syahriyal Kepala Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Mei 2018

menanggulangi kemiskinan. Program ini dinamakan “Pinjaman jasa Bergulir” yaitu salah satu dari program kerja BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.⁸²

BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah adalah suatu program pemerintah yang beroperasi dalam penanggulangan kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bagi pengembangan usaha masyarakat, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan BUMDES direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat dan tentunya tidak lepas dari aspek tridaya yaitu sosial, ekonomi dan fisik. Terkait dengan adanya kegiatan review dari perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang yang telah berjalan selama satu tahun lebih, tentunya BKM Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah akan mengalami banyak perubahan-perubahan baik yang direncanakan maupun tidak, begitu pula dengan program, ada program yang berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan dan mungkin juga ada yang tidak. Oleh karena perlu

⁸² *Ibid.*

dilakukan review rencana program yang ada baik program maupun renta tahun-tahun sesudahnya dengan tetap mempertimbangkan aspek tridaya.⁸³

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kredit usaha di tingkat desa sangat kental artinya masyarakat terlibat secara aktif mulai dari perencanaan, pembentukan kelompok, pelaksanaan, pencarian dana bahkan yang membuat aturan dan sanksi juga masyarakat itu sendiri

Dengan adanya kegiatan review, diharapkan BKM secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit pengelola serta sebagai proses pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan BKM kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama masyarakat miskin.

Menurut Mardani tak kalah pentingnya mampu menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga terhadap program-program pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara dan berkelanjutan khususnya di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.⁸⁴

Kegiatan review merupakan kegiatan peninjauan kembali terhadap seluruh rangkaian program yang harus dilakukan khususnya program jangka menengah untuk mencapai kesempurnaan dan sesuai kebutuhan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Wawancara dengan Mardani, Ketua LKMD Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Mei 2018

dimasyarakat. Secara umum proses review program jangka pendek, menengah dan panjang di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah diawali dengan sosialisasi terhadap BKM tentang kegiatan review partisipatif baik review kelembagaan, keuangan maupun perencanaan program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Khusus dalam kegiatan review program di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah menurut Siti Nurjanah⁸⁵ dimulai dengan pembentukan tim review yang sebelumnya dilakukan penguatan terhadap tim tersebut tentang proses yang akan dilakukan, Siti Nur Janah menyatakan: Tim review akan bertugas untuk mengadakan penggalian usulan ditingkat basis baik RT yang kemudian dilakukan rekapitulasi tentang usulan yang ada. Setelah semua telah direkap dan ditabulasi kedalam format yang ada kemudian dilakukan lokakarya di tingkat desa untuk menyepakati program usulan baik mengenai program, perkiraan biaya dan kapan program tersebut akan dilaksanakan, dan hal ini jelas telah melalui proses skoring untuk menentukan skala prioritas usulan program.⁸⁶

Dalam penggalian usulan tingkat basis juga dilakukan reorientasi program untuk mengupdate data KK miskin serta reorientasi program dan renta yang telah disusun dan dilaksanakan sebelumnya. Reorientasi ini bermaksud untuk melakukan kajian ulang tentang KK miskin yang sudah maupun belum masuk kedalam data, serta mengkaji ulang tentang program mana yang belum dan sudah dilaksanakan pada periode tahun-tahun

⁸⁵ Wawancara dengan Siti Nurjanah, Ketua PMD Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Mei 2018

⁸⁶ *Ibid.*

sebelumnya. Dari proses yang telah dilakukan kemudian didapatkan hasil review yang kemudian dikomparasikan dengan program Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah untuk mencapai sinergi dan kesepahaman bersama agar tidak terjadi tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil yang didapatkan kemudian dilakukan lokakarya di tingkat desa untuk penyepakatan bersama tentang hasil review dan kemudian disahkan bersama BKM dan Kepala desa untuk dijadikan acuan pembangunan bagi Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya demi mencapai kean bagi masyarakat Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah. ⁸⁷

Lebih lanjut Siti Nur Janah Perencanaan BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah didasarkan pada pedoman teknis yang mengenai bagaimana mengelola program khususnya pinjaman bagi pengembangan ekonomi masyarakat di UPK. Aturan tersebut menyangkut mengenai kriteria pengelola dan penerima pinjaman, Skim pinjaman, tahapan pemberian pinjaman, pembukuan pinjaman bergulir, monitoring pinjaman, penyelesaian pinjaman yang bermasalah serta pelaporan pinjaman dengan bunga kecil. ⁸⁸

Secara singkat aturan pokok yang diatur dalam pedoman teknis yang direncanakan dalam program BUMDES melalui pinjaman kepada masyarakat antara lain:

- a. Kelayakan kelompok usaha

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

Kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh kelompok usaha dengan kriteria kelayakan yang disebutkan berupa kelayakan usaha kelompoknya. Lembaga yang langsung mengelola kegiatan pinjaman bagi kelompok usaha di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit Pengelola yang berada dibawah LKM. Dua unit pengelola lainnya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

Sebelum kegiatan pinjaman dalam kelompok usaha di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik untuk kelompok maupun untuk anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Kegiatan pinjaman dapat dilaksanakan, hanya jika para pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan. UPK bertanggungjawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan. ⁸⁹

- b. LKM dengan persetujuan masyarakat telah membuat aturan dasar pinjaman yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM. ⁹⁰

Mardani menyatakan, kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh KSM beserta anggotanya sesuai dengan kriteria kelayakan. KSM

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Dokumentasi Profil Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, di kutip pada tanggal 21 Mei 2018

Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman dari UPK.⁹¹

Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh LKM/UPK. Dengan kata lain, KSM peminjam dan anggotanya yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM peminjam tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam.

a. Kriteria kelayakan KSM di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

- 1) KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, pinjaman (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng, dan tahapan peminjaman), kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM.
- 2) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial;
- 3) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan;
- 4) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat.
- 5) Jumlah anggota KSM minimal 5 orang;

⁹¹ Wawancara dengan Mardani, Ketua LKMD Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Mei 2018

- 6) Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan
 - 7) Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan
 - 8) Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam pernyataan kesanggupan tanggung renteng.
 - 9) Semua anggota KSM telah memperoleh dari fasilitator dan LKM/UPK
- b. Kriteria kelayakan anggota KSM di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah
- 1) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah
 - 2) Termasuk dalam kategori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat;
 - 3) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain.
 - 4) Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5% dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya minimal 5 % selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas (tidak wajib).
 - 5) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya;

6) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.

c. Skim pinjaman

Skim Pinjaman yang diatur dalam pinjaman antara lain :

- 1) Peminjam adalah KSM dan anggotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan
- 2) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha
- 3) Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam. Pinjaman selanjutnya maksimal Rp. 2.000.000,- (diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola channeling dengan lembaga keuangan atau bank lainnya), frekuensi peminjaman maksimal 4 kali.
- 4) Pinjaman diberikan kepada setiap kelompok usaha yang terdiri dari sekitar 10 orang dengan cara “*tanggung renteng*” artinya apabila ada salah satu anggota yang tidak membayar cicilan maka anggota kelompok lainnya yang bertanggung jawab, sehingga terjadi sinergitas diantara anggota kelompok.
- 5) Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjam

- 6) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa grace period (tenggang waktu)
- 7) Jasa pinjaman 1,5 s/d 3 % per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK.⁹²

Menurut Syahriyal⁹³ Pengangguran dan kemiskinan adalah masalah yang sangat besar di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dan tidak mudah untuk mengatasinya. Pemerintah lewat BUMDES hadir untuk menangani masalah tersebut dengan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat dari menemukan, merencanakan, melaksanakan sampai mengevaluasi semua kegiatan.

Melihat Kondisi Kemiskinan umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah yang masih banyak kondisinya sangat memprihatinkan maka perlu upaya untuk membuat mereka terlepas dari masalah kemiskinan. Untuk itulah BUMDES membuat rencana jangka menengah bersama tokoh masyarakat dari perwakilan tiap-tiap RT dalam upaya memecahkan masalah tersebut.

Dalam perencanaan pemberian “pinjaman diatur kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Pengajuan Pinjaman

⁹² Dokumentasi program BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah di kutip pada tanggal 21 Mei 2018

⁹³ Wawancara dengan Syahriyal Kepala Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Mei 2018

Calon peminjam mempersiapkan segala keperluan yang dipersyaratkan untuk memperoleh pinjaman, baik pelatihan, pembentukan simpanan, maupun kelengkapan dokumen dan pengisian blanko pengajuan pinjaman.

Pada tahap pengajuan, petugas UPK wajib menjelaskan ketentuan pinjaman termasuk bahwa pinjaman ini sifatnya adalah hutang yang harus dibayar kembali, bukan hibah

b. Tahap Pemeriksaan Pinjaman

Petugas pinjaman UPK memeriksa dokumen pengajuan pinjaman yang diajukan KSM beserta anggotanya baik secara administratif maupun kunjungan lapangan menganalisis dan membuat usulan atau rekomendasi kepada Manajer UPK atas permohonan pinjaman dimaksud.

c. Tahap Putusan Pinjaman

Manajer UPK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh KSM didasarkan pada hasil analisis petugas pinjaman UPK.

d. Tahap Realisasi Pinjaman

Permohonan pinjaman KSM yang telah disetujui oleh manajer UPK disiapkan dokumen untuk pencairan, kemudian direalisasikan atau dicairkan pembayarannya kepada KSM dan anggotanya.

Pada tahap realisasi petugas UPK juga wajib kembali menegaskan dan menjelaskan semua ketentuan pinjaman termasuk ketentuan bahwa pinjaman adalah utang yang wajib dibayar kembali dan bukan hibah.

e. Tahap Pembinaan Pinjaman

Minimal 1 bulan setelah pinjaman direalisasi petugas UPK wajib memantau keadaan peminjam, perkembangan usaha dan penggunaan pinjaman apakah digunakan sesuai tujuan semula.

Pada tahapan ini petugas juga wajib mengingatkan peminjam tentang kewajiban angsuran yang harus dilakukan dan juga mengingatkan kembali bahwa pinjaman ini adalah utang bukan hibah.

f. Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman

Peminjam melakukan pembayaran kembali atas pinjamannya. Agar tidak sampai terjadi keterlambatan atau tunggakan, maka petugas UPK beberapa hari sebelum waktu pembayaran wajib mengingatkan peminjam atas kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas ini petugas UPK dapat dibantu oleh relawan, aparat “Pinjaman Bergulir”, tokoh masyarakat maupun pengawas UPK.⁹⁴

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES bagi

⁹⁴ Dokumentasi program BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah di kutip pada tanggal 21 Mei 2018

Pemberdayaan ekonomi umat melalui pinjaman di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah sebagaimana pernyataan Siti Nur Janah bahwa partisipasi masyarakat dalam program BUMDES menggunakan strategi pendekatan penguatan kelembagaan lokal dari masyarakat warga dan mendorong potensi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengatasi persoalan pengangguran secara. Untuk itulah dibangunlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang bersifat independen dan bercirikan sebagai paguyuban masyarakat yang berfungsi sebagai dewan pengambil kebijakan dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, maka untuk itulah disusunlah suatu Program Penanggulangan Kemiskinan dan dalam sebuah perencanaan partisipatif yang tertuang dan teraplikasi dalam Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran.⁹⁵

Pinjaman sebagai produk rencana masyarakat memiliki dimensi waktu rencana yang perlu dievaluasi dan direview secara berkala untuk mencapai kesempurnaan dan sesuai kebutuhan dimasyarakat. Adapun kegiatan tersebut minimal dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat bersama pemerintah baik secara teknis maupun substansi untuk menggali usulan bersama dan mencapai kesepakatan bersama khususnya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun materiil.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Siti Nurjanah, Ketua PMD Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Mei 2018

⁹⁶ *Ibid.*

2. Pelaksanaan BUMDES dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

Pelaksanaan di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada warga, menurut Syahriyal,⁹⁷ pelaksanaan BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah bertujuan memberikan pinjaman kepada keluarga miskin, rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar sehingga tidak lagi menganggur.

Lebih lanjut Syahriyal⁹⁸ menyatakan, sasaran utama pelaksanaan kegiatan BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah melalui pinjaman adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki home industri.

Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah melalui pemberian pinjaman yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah:

- a. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman adalah milik masyarakat Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dan bukan milik perorangan;

⁹⁷ Wawancara dengan Syahriyal Kepala Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Mei 2018

⁹⁸ *Ibid.*

- b. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah
- c. Pengelolaan pinjaman berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya;
- d. Pengelolaan pinjaman dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman yang bertanggungjawab langsung kepada LKM;
- e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman standar yang ditetapkan⁹⁹.

Menurut Syahriyal¹⁰⁰, masalah kemiskinan di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah sangat kompleks mulai dari PHK, Sulit mencari kerja, upah kerja rendah, pemasaran sepi, kurang modal, dan keahlian yang minim menjadi penyebab kemiskinan yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Oleh karena itu, melalui program penanggulangan pengangguran akan mengupayakan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga miskin yang ada di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah ,

⁹⁹ Dokumentasi Profil Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, di kutip pada tanggal 21 Mei 2018

¹⁰⁰ Wawancara dengan Syahriyal Kepala Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Mei 2018

dengan cara mengoptimalkan potensi atau keahlian yang dimiliki oleh warga miskin dalam sebuah kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian juga menurut Rumiati¹⁰¹ adalah salah satu desa yang terdapat di dalam bagian dari Kalimantan Tengah, yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh. Karena bermata pencaharian sebagai nelayan masyarakat Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah hanya mengandalkan penghasilan laut yang menjadi pondasi dalam kehidupannya dan yang bermata pencaharian buruh hanya mengandalkan kerja serabutan yang setiap hari belum tentu ada. Apabila laut yang diandalkan tersebut tidak mampu menghasilkan apa yang dituju oleh masyarakat, maka kehidupan perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan akan terganggu, begitu juga pada masyarakat yang bekerja sebagai buruh, jika tidak ada yang membutuhkan tenaganya maka kebutuhan hidupnya akan terganggu.

Dalam suatu kondisi dimana keadaan yang menyulitkan para nelayan untuk mengembangkan hasil melaut dan mengembangkan home industri karena disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang masih minim bagi para nelayan dan masyarakat, adanya program BUMDES membawa solusi bagi para nelayan dan masyarakat lain dalam hal pemenuhan faktor-faktor produksi, terutama dalam hal pemenuhan permodalan. Karena hadirnya BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah mampu

¹⁰¹ Wawancara dengan Rumiati, Ketua Kelompok Usaha Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Mei 2018

memberi solusi terutama dalam hal pemecahan dana yang selama ini mereka butuhkan untuk mengembangkan hasil melaut dan usaha home industri yang mulai digeluti yang lebih baik. Masa-masa sekarang ini terdapat banyak lembaga-lembaga yang bertujuan untuk memenuhi modal usaha masyarakat namun tidak luput dari unsur laba didalamnya. Lembaga-lembaga profit yang hanya mencari keuntungan semata mungkin hanya akan menambah beban bagi masyarakat Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah. Akan tetapi setelah adanya BUMDES, masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Program yang ditawarkan BUMDES adalah program “Pinjaman Jasa Bergulir”.

Program “Pinjaman Jasa Bergulir” BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada mulanya adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat semata. Namun didalamnya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kreditur BUMDES dengan debitur yaitu masyarakat miskin dalam pengembaliannya. Dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disyaratkan atau diucapkan sendiri oleh warga masyarakat tanpa adanya ketentuan berapa persen atau berapa nominal pengembaliannya.¹⁰²

Masyarakat memberikan pengembalian tanpa adanya paksaan sedikitpun dari pihak BUMDES. Kemudian hasil kelebihan dari masyarakat tersebut digunakan untuk biaya operasional dan sisanya dikembalikan lagi

¹⁰² Wawancara dengan Syahriyal Kepala Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Mei 2018

pada masyarakat untuk kesejahteraan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah skim pinjaman jasa bergulir di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah: Skim Pinjaman yang diatur dalam pinjaman (yang dinamakan sistem “renteng”) oleh BUMDES antara lain:

- a. Peminjam adalah KSM dan anggotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (warga miskin dan sesuai dengan hasil survei di lapangan yang tertuang dalam dokumen pemetaan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan ketentuan criteria kemiskinan yang telah disepakati bersama)
- b. Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha (tujuan untuk peningkatan ekonomi yang diiringi dengan penguatan melalui pelatihan pengembangan ekonomi lokal)
- c. Besar pinjaman diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan persetujuan BKM melalui UPK/ UPS sesuai dengan kemampuan peminjam.
- d. Jangka waktu pinjaman paling lama pada saat musim panen tiba atau bulanan sesuai dengan kondisi lapangan dan kesepakatan bersama.
- e. Angsuran pinjaman maksimal bulanan, atau diberikan pada saat musim panen, atau perbulan bagi home industri, minimal dengan modal awal yang dipinjam kembali utuh.

- f. Jasa pinjaman diserahkan kepada pihak peminjam sesuai dengan hasil panen yang didapat.
- g. Jenis jasa pinjaman yang digunakan adalah bebas tergantung besar kecilnya hasil yang didapat
- h. Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK (baik untuk alat tulis, fotocopy, gaji pengelola yang disepakati bersama masyarakat) mengingat form pembukuan yang digunakan cukup banyak.
- i. Kalau dirasa masih belum cukup perlu disepakati bersama seluruh warga dengan tidak memberatkan warga khususnya peminjam.¹⁰³

Sistem pinjaman diatur secara bergilir sesuai dengan kesepakatan BKM dan keseluruhan masyarakat serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Keuntungan (Laba) minimal dapat menutup biaya operasional untuk membiayai kegiatan BKM dan lainnya, dan untuk pemupukan modal (disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD).¹⁰⁴

Dari hasil yang didapat pertahun dialokasikan sebagai berikut berdasarkan kesepakatan bersama

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| a. Kegiatan sosial | 10% |
| b. Kegiatan lingkungan | 50% |
| c. Kegiatan ekonomi (Pemupukan modal) | 25% |
| d. BOP BKM | 5% |

¹⁰³ Dokumentasi Profil Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, di kutip pada tanggal 21 Mei 2018

¹⁰⁴ Wawancara dengan Siti Nurjanah, Ketua PMD Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Mei 2018

- e. Biaya Operasional Pengawas 10%¹⁰⁵

Dasar pertimbangan di atas sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES dalam Pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah diantaranya:

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk porsi kegiatan lingkungan yaitu pembangunan infrastruktur cukup besar berdasarkan hasil perencanaan yang tertuang dalam Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran
- b. Kegiatan sosial diberikan kepada orang miskin yang tidak seperti anak yatim, beasiswa prestasi tapi kurang, dan pengangguran sesuai kesepakatan bersama masyarakat.¹⁰⁶

Tujuan dilaksanakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES dalam Pemberdayaan ekonomi umat melalui pinjaman di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

- a. Secara umum tujuan yang ingin dicapai yaitu menciptakan desa yang dan tangguh dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- b. Tujuan khusus :
 - 1) Terwujudnya masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri terutama dalam bidang ekonomi.
 - 2) Memberikan pelayanan kesehatan bagi KK miskin dengan kualitas baik dan terjangkau.

¹⁰⁵ Dokumentasi program BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah di kutip pada tanggal 21 Mei 2018

¹⁰⁶ *Ibid.*

3) Meningkatkan pendidikan di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

4) Menciptakan kerja sama dan kepercayaan antar warga.¹⁰⁷

Kegiatan ekonomi untuk pemupukan modal sangat penting, menurut Syahriyal, perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan selanjutnya karena masyarakat diharapkan untuk bisa tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain. Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin dan pengangguran melalui pembelajaran dan pemberdayaan secara konsep awal sampai akhir program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah adalah pada koridor penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang bertujuan mewujudkan perubahan sosial masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut:

- a. Bermanfaat bagi warga miskin dan pengangguran
- b. Memberikan peningkatan ekonomi
- c. Perubahan perilaku
- d. Lingkungan tertata
- e. Permasalahan dapat terselesaikan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan BKM mampu secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit pengelola serta sebagai proses pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan BKM kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan pengangguran terutama masyarakat miskin. Tak kalah pentingnya mampu menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga terhadap program-program pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara dan berkelanjutan khususnya di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.¹⁰⁹

Pelaksanaan BUMDES bagi Pemberdayaan ekonomi umat melalui pinjaman di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah sekarang telah berdiri beberapa kelompok usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) berupa pembuatan jaring, ikan asin, alat penangkap rajungan, pedagang keliling dan warung kecil yang kesemuanya dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap anggota dalam sistem tanggung renteng, setiap kelompok juga aktif melakukan diskusi yang diketuai oleh ketua kelompok masing-masing dalam mengembangkan usaha dan mengembalikan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Syahriyal Kepala Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Mei 2018

¹⁰⁹ *Ibid.*

pinjaman sesuai perjanjian sehingga nantinya akan mendapatkan pinjaman lagi yang lebih besar dari program BUMDES.¹¹⁰

Dalam rangka peningkatan ekonomi umat, beragam kebersamaan tiga pilar utama pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli (LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya) sangat diperlukan. Kebersamaan tersebut mutlak diperlukan karena diharapkan mampu mewujudkan sinergitas kepentingan dan program ketiga pilar tersebut yang pada akhirnya mampu mempercepat proses penanggulangan pengangguran.

3. Evaluasi BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

Evaluasi BUMDES dalam Pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dilakukan melalui:

a. Pengawas UPK

Pengawas UPK yang bertugas mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola pinjaman telah memenuhi kriteria minimal antara lain:

- 1) Telah diangkat oleh LKM dengan persetujuan masyarakat sebanyak 2-3 orang, memenuhi unsur laki-laki dan perempuan
- 2) Telah memiliki uraian tugas yang mencakup tugas dan tanggungjawab pengawas
- 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMDES Perkotaan

¹¹⁰ Observasi, pada tanggal 21-26 Mei 2018

- b. UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek. Pedoman pelaksanaan kegiatan pinjaman ini adalah pedoman dasar yang menjadi pegangan fasilitator dan pihak-pihak terkait (pelaku BUMDES) dalam mengawal pelaksanaan kegiatan “Pinjaman” oleh UPK. Pedoman pelaksanaan ini hanya berisi pokok-pokok kegiatan yang harus dipahami dalam memberikan pendampingan kepada LKM, UPK dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).¹¹¹

Setiap kelompok usaha yang mendapatkan pinjaman dari BUMDES diuntut dan diarahkan untuk *transportasi dan akuntabel*. Kelompok harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. *Akuntabilitas* diwujudkan dalam bentuk setiap pengeluaran dana dalam pelaksana pengadaan barang atau jasa dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, seperti pencatatan penerimaan dan pengeluaran, kuitansi pembelian dan bukti pembayaran honor, maupun secara teknik seperti kuantitas dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan rencana.¹¹²

Evaluasi juga dilakukan melalui usul dari anggota kelompok

¹¹¹ Dokumentasi program BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah di kutip pada tanggal 21 Mei 2018 dan Wawancara dengan Mardani, Ketua LKMD Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Mei 2018

¹¹² Wawancara dengan Mardani, Ketua LKMD Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Mei 2018

terhadap permasalahan yang dihadapi untuk dipertimbangkan dan diskusikan dibawah bimbingan UPK untuk dicarikan solusi dan inisiatif untuk mengatasi permasalahan sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan menjadikan pengangguran di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah semakin berkurang. Evaluasi tidaklah dilaksanakan oleh semua anggota tetapi ada badan khusus yang bertugas untuk mengevaluasi yaitu Badan Pemeriksa (BP). Hasil dari pemeriksaan dilaporkan kepada anggota setiap tri wulan dan pada tutup buku akhir tahun.¹¹³

Evaluasi juga dilakukan dengan saling mengawasi dan memberikan teguran diantara kelompok usaha dalam mengelola dana yang diberikan BUMDES dan saling mendukung usaha yang dilakukan anggota, karena setiap pengembalian yang tepat waktu dari setiap kelompok usaha akan mendapatkan reward satu sampai dua juta sebagai bagi hasil dari peminjaman tersebut yang diberikan kepada kelompok.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

BAB IV

**PERAN BUMDES BAGI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI DESA
SEI CABANG BARAT KALIMANTAN TENGAH**

**C. Analisis Implementasi BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di
Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.**

1. Analisis Perencanaan BUMDes bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa
Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹¹⁵ Dalam hal ini adalah merencanakan usaha yang akan dilakukan oleh anggota BUMDes dan perencanaan cara kerja dalam usaha tersebut

Perencanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dilakukan dengan mengidentifikasi dan menentukan jenis-jenis kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi program karya yang dikembangkan masyarakat, mengembangkan ekonomi masyarakat, mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, membantu perekonomian masyarakat dan membuat penilaian yang

¹¹⁵ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Manajemen*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005, hl. 4

disesuaikan program kerja yang telah dilakukan, namun perencanaan secara sistematis belum terlaksana sehingga sebatas kebutuhan sederhana.

Berbagai perencanaan yang dilakukan pada BUMDES harus sesuai dengan Cutlip-Center-Broom sebagaimana dikutip oleh Morissan,¹¹⁶ yaitu:

a. Menentukan masalah (*defining the problem*)

Tindakan pertama yang harus dilakukan praktisi BUMDES sebelum menyusun program kerjanya adalah memahami situasi atau masalah yang ada. Langkah pertama ini meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku masyarakat (pihak-pihak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi).

Dalam tahap pertama ini diperlukan adanya penelitian terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan penelitian di sini adalah *data collecting* (pengumpulan data) dan *fact finding* (pengkajian fakta). Partisipasi masyarakat dalam BUMDES Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dapat menyusun dan menjawab serangkaian pertanyaan seperti: di mana posisi suatu BUMDES berada, apa yang diketahui atau tidak diketahui masyarakat mengenai BUMDES tersebut, apakah ada kesalahan dalam pandangan mereka, bagaimana perencanaan data penerima pinjaman yang sesuai dan sebagainya.

Data faktual yang sudah terhimpun merupakan keterangan

¹¹⁶ Morissan, *Manajemen Public Relation: Strategi Menjadi Humas Profesional*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108

mentah yang harus diolah terlebih dahulu. Dalam kegiatan pengolahan, perencanaan BUMDES melakukan perbandingan, pertimbangan dan penilaian, sehingga akhirnya menjadi informasi yang akurat.

b. Perencanaan dan penyusunan program (*planning and programming*)

Perencanaan dalam sebuah BUMDES menempati posisi yang strategis dalam keseluruhan kerja BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah. Perencanaan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan program BUMDES, sehingga perencanaan dalam sebuah program akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

Masalah yang telah ditentukan pada langkah pertama digunakan untuk menyusun program, tujuan, tindakan dan strategi komunikasi.¹¹⁷ Perencanaan program BUMDES di BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dilakukan berbagai identifikasi khususnya terkait dengan kelayakan kelompok usaha dan LKM yang diobservasi dan diteliti dengan sesama oleh pengurus BUMDES

Proses perencanaan dan penetapan program BUMDES di Desa mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan peran dan misi.
- 2) Menentukan wilayah sasaran.
- 3) Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas (*indicators of effectiveness*) dari setiap pekerjaan yang dilakukan.

¹¹⁷ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Kompetensi....*, h. 108-109

- 4) Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang akan dicapai.
- 5) Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari:
 - a) *Programming*, menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan.
 - b) Penjadwalan, *menentukan* waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan.
 - c) Anggaran, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan.
 - d) Pertanggungjawaban, menetapkan siapa pihak yang akan menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum.
 - e) Menguji dan merevisi rencana sementara (*tentative plan*) sebelum rencana tersebut dilaksanakan.
 - f) Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi.
 - g) Menentukan komunikasi yang diperlukan.
 - h) Pelaksanaan, memastikan persetujuan di antara semua pihak, siapa saja yang perlu dilibatkan dan langkah atau tindakan apa yang harus segera dilakukan.¹¹⁸

Proses di atas dilakukan dalam Perencanaan program BUMDES di BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah melalui rencana kerja meskipun kurang sistematis.

Berbagai tahap perencanaan di atas merupakan bagian dari pengelolaan BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah agar

¹¹⁸ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Kompetensi....*, h. 153-154

target pengurangan pengangguran semakin berkurang dan terciptanya masyarakat yang produktif yang mampu berperan aktif dalam sosial masyarakat dengan keahlian yang dimilikinya, karena pada dasarnya perencanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam program yang dilakukan akan menentukan tujuan/kerangka tindakan yang diperlukan untuk dapat memulai usaha. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga menentukan kesempatan dan kelemahan, menentukan keinginan dan kebutuhan organisasi dan menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program.

Selain itu perencanaan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah menurut peneliti harus memenuhi prinsip-prinsip:

- a. Perencanaan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah harus betul-betul merupakan proses intelektual.
- b. Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan.
- c. Perencanaan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah harus realistis, sesuai dengan kenyataan anggaran dan kebutuhan masyarakat.

- d. Visualisasi hasil perencanaan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah harus jelas dan rinci.¹¹⁹

Perencanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah menurut peneliti merupakan suatu perencanaan yang mengandung pokok pikiran sebagai berikut: (1) perencanaan selalu berorientasi ke masa depan; maksudnya perencanaan berusaha meramalkan bentuk dan sifat masa depan yang diinginkan organisasi berdasarkan situasi dan kondisi masa lalu dan masa sekarang; (2) perencanaan merupakan suatu yang sengaja dilahirkan dan bukan kebetulan, sebagai hasil pemikiran yang matang dan cerdas yang bersumber dari hasil *eksplorasi* sebelumnya; (3) perencanaan memerlukan tindakan, baik oleh individu maupun organisasi yang melaksanakannya; dan (4) perencanaan harus bermakna, maksudnya dengan perencanaan usaha-usaha yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi lebih *efektif* dan *efisien*.

Suatu rencana sebaiknya disusun dengan analisis kebutuhan, pencapaian tujuan dan berorientasi kepada hasil kegiatan dan mutu pendidikan. Dalam kaitan ini Muwahid Shulhan dan Soim menjelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil akhir: yaitu spesifikasi dari berbagai tujuan/sasaran, target perencanaan. Di sini ditentukan apa yang ingin dicapai dan bilamana

¹¹⁹ Ibrahim Bafadhol, *Supervisi Pembelajaran Teori dan Aplikasinya dalam Membina Profesionalitas Pendidik*, Jakarta: Bumi Aksarah, 2002, h. 27

kita akan mencapainya.

- b. Alat-alat: yaitu meliputi pemilihan kebijaksanaan, strategi, prosedur dan prakteknya. Di sini ditentukan dengan apa dapat menyelesaikan rencana.
- c. Sumber-sumber: yaitu meliputi kuantitas, mendapatkan dan mengalokasikan bermacam sumber, antara lain: tenaga kerja, keuangan, material dan sebagainya.
- d. Pelaksanaan: yaitu penentuan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan dan
- e. Pengawasan: yaitu menentukan apa yang akan dilakukan dalam menemukan kesalahan, kegagalan rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan selanjutnya.¹²⁰

BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah memberikan dilakukan menanggulangi pengangguran dan dilakukan dengan cara merencanakan pemberian pinjaman kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pengangguran berkurang dengan home industri atau perdagangan.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kredit usaha di tingkat desa sangat kental artinya masyarakat terlibat secara aktif mulai dari perencanaan, pembentukan kelompok, pelaksanaan, pencarian dana bahkan

¹²⁰ Muwahid Shulhan dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013, h. 65

yang membuat aturan dan sanksi juga masyarakat itu sendiri sehingga mampu menumbuhkan semangat dan proses usaha, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga terhadap program-program pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara dan berkelanjutan khususnya di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

Setiap kelompok usaha Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah yang akan mendapatkan bantuan pinjaman usaha dilakukan review yang merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan dana BUMDES dalam membantu masyarakat yang diawali dengan sosialisasi, pembentukan tim review yang dengan penggalian usulan ditingkat basis baik RT yang kemudian dilakukan rekapitulasi tentang usulan yang ada. Setelah semua telah direkap dan ditabulasi kedalam format yang ada kemudian dilakukan lokakarya di tingkat desa untuk menyepakati program usulan baik mengenai program, perkiraan biaya dan kapan program tersebut akan dilaksanakan, dan hal ini jelas telah melalui proses skoring untuk menentukan skala prioritas usulan program.

Dari hasil yang didapatkan kemudian dilakukan lokakarya di tingkat desa untuk penyepakatan bersama tentang hasil review dan kemudian disahkan bersama BKM dan Kepala desa untuk dijadikan acuan pembangunan bagi Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya demi mencapai kean bagi

masyarakat Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

Perencanaan BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah menurut peneliti didasarkan pada pedoman teknis yang mengenai bagaimana mengelola program khususnya pinjaman bagi pengembangan ekonomi masyarakat di UPK. Aturan tersebut menyangkut mengenai kriteria pengelola dan penerima pinjaman, Skim pinjaman, tahapan pemberian pinjaman, pembukuan pinjaman bergulir, monitoring pinjaman, penyelesaian pinjaman yang bermasalah serta pelaporan pinjaman dengan bunga kecil.

Rencana kriteria dari pemberian pinjaman dari BUMDES diantaranya: Kelayakan kelompok usaha, kriteria KSM dan masyarakatnya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng masyarakat KSM. Dalam perencanaan pemberian “pinjaman diatur kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan mulai dari tahap pengajuan pinjaman, tahap pemeriksaan pinjaman, tahap putusan pinjaman, tahap realisasi pinjaman, tahap tahap pembinaan pinjaman dan tahap pembayaran kembali pinjaman

Sistem perencanaan yang dilakukan secara sistematis mulai dari pendataan penerima pinjaman, pengelolaan pinjaman dan pengembangan pinjaman menjadikan setiap usaha yang dilakukan BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah tepat arah. Menurut peneliti perencanaan yang dilakukan sudah cukup baik dalam mengelola setiap sumber dana

yang ada di BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat karena tepat guna dan sesuai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh baik buruknya perencanaan.
 - b. Perencanaan harus memandang atau meramalkan kejadian dimasa yang akan mendatang, berdasarkan kenyataan objektif yang ada pada masa sekarang dan masa lalu.
 - c. Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya suatu tujuan sehingga bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah kurang sempurnanya perencanaan.
 - d. Perencanaan juga harus memikirkan anggaran, kebijakan, prosedur, metode, dan kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Analisis Pelaksanaan BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

Pelaksanaan merupakan upaya perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan, dan pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. BUMDes dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan bekal kemampuan pengelolaan usaha yang telah diberikan oleh pengurus

BUMDes.¹²¹

Pelaksanaan BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

- d. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan. Hal ini dilakukan dalam program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah melalui berbagai bentuk kelompok usaha yang ada mulai dari perdagangan, nelayan dan sebagainya
- e. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan *skill* dan kemampuan manajerial, hal ini dilakukan dalam program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah melalui berbagai pelatihan dan pendampingan kelompok usaha.
- f. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.¹²² dalam program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang persaingan usaha

¹²¹ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Manajemen*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005, hl. 4

¹²² *Ibid*, h. 66-67

sehingga tetap survive, namun hal ini berdasarkan pengamatan peneliti kurang dilakukan secara kontinyu.

Pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah adalah melaksanakan secara fisik kegiatan dan aktivitas, maka pengelola BUMDES perlu menggerakkan staf dan masyarakat untuk beraksi/bekerja. Pelaksanaan di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar sehingga tidak lagi yang menganggur. Sasaran utama pelaksanaan kegiatan BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah melalui pinjaman adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki home industri.

Dimensi *enabling* atau *capacity building* menurut pendapat para pakar diatas pada dasarnya menciptakan susana iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal sehingga masyarakat bisa secara mandiri untuk melaksanakan keinginannya dengan indikator dorongan meningkatkan produktivitas kerja, keinginan kuat untuk maju, pemenuhan kebutuhan, pemberian insentif berupa tambahan uang atau barang untuk meningkatkan gairah kerja, harapan berupa keinginan untuk penghidupan

yang layak dan lebih baik, memberikan informasi, memberikan pemahaman, menumbuhkan kesadaran dan menumbuhkan inisiatif.¹²³ dalam program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah melalui program kredit mikro kelompok usaha dan pendampingan mampu meningkatkan gairah kerja

Dimensi *empowering* dalam arti sempit adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat berupa penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Indikator *empowering* adalah peningkatan pengetahuan tentang pembangunan, peningkatan keterampilan penggunaan teknologi, kesempatan mendapatkan bantuan pemerintah, kesempatan menyampaikan pendapat dalam rapat atau pertemuan, akses bantuan pemahaman hukum, kemungkinan masuk daftar penerima kredit atau pinjaman modal, penggunaan teknologi yang lebih maju, terbukanya lapangan kerja, penyediaan informasi kerja sama dengan pihak lain, pembangunan fisik berupa jalan, dan listrik, pembangunan sosial berupa sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan lembaga pendanaan atau permodalan, ketersediaan lembaga pelatihan, pembangunan sarana perekonomian seperti pasar.¹²⁴ Dalam program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan

¹²³ *Ibid*, h. 69

¹²⁴ *Ibid*, h. 69

Tengah dilakukan pendampingan meskipun belum maksimal, namun kekuatan teknologi belum diterapkan oleh kelompok usaha yang berada dalam naungan BUMDes sehingga perlu menjadi satu rujukan yang peniting bagi pengurus BUMDes dan kelompok usaha untuk mengemangkannya

Dimensi *protecting* atau perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Indikator *protecting* melindungi masyarakat yang lemah, miskin, dan yang tidak mempunyai lahan, melindungi pihak yang lemah pada transaksi jual-beli yang adil, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir (pengijon), melindungi kaum lemah dari berbagai bentuk pemerasan, kemudahan dan keringanan dalam membayar utang atau kredit, biaya ringan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, melindungi semua pihak yang terlibat dalam program, pengaturan upah yang layak, aturan jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang merugikan golongan yang lemah, aturan tidak diskriminatif, persaingan seimbang untuk mendapatkan pekerjaan, persaingan seimbang untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, akses yang sama untuk mendapatkan informasi atau keterangan pemerintah, mencegah monopoli barang dan jasa, membentuk pergaulan antar sesama anggota masyarakat, penduduk yang tersebar menjadi memusat, penduduk yang tertutup menjadi membuka diri, meningkatkan hubungan dengan

pemerintah, pemberitahuan tentang kegiatan pemerintah, menjalin komunikasi antar kelompok.¹²⁵ dengan adanya kredit mikro dalam program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah masyarakat mulai mengurangi ketergantungan dengan rentenir, namun kebiasaan dari beberapa anggota yang tidak mengangsur dengan baik menjadi kendala yang perlu dibenahi dengan baik.

Masalah kemiskinan dan pengangguran di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah sangat kompleks mulai dari PHK, Sulit mencari kerja, upah kerja rendah, pemasaran sepi, kurang modal, dan keahlian yang minim menjadi penyebab kemiskinan yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Oleh karena itu, melalui program penanggulangan pengangguran akan mengupayakan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga miskin yang ada di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, dengan cara mengoptimalkan potensi atau keahlian yang dimiliki oleh warga miskin dalam sebuah kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah adalah salah satu desa yang terdapat di Kalimantan Tengah, yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh. Karena bermata pencaharian sebagai nelayan, masyarakat Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah hanya mengandalkan laut yang menjadi pondasi dalam

¹²⁵ *Ibid*, h. 69-70

kehidupannya dan yang bermata pencaharian buruh hanya mengandarkan kerja serabutan yang setiap hari belum tentu ada. Faktor modal menjadi faktor utama dalam mengembangkan masyarakat dan mengatasi pengangguran sebagai bentuk pengembangan ekonomi umat. Hadirnya BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah mampu memberi solusi terutama dalam hal pemecahan dana yang selama ini mereka butuhkan untuk mengembangkan hasil melaut dan usaha home industri yang mulai digeluti yang lebih baik. Masa-masa sekarang ini terdapat banyak lembaga-lembaga yang bertujuan untuk memenuhi modal usaha masyarakat namun tidak luput dari unsur laba didalamnya. Lembaga-lembaga profit yang hanya mencari keuntungan semata mungkin hanya akan menambah beban bagi masyarakat Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah. Akan tetapi setelah adanya BUMDES, masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Program yang ditawarkan BUMDES adalah program “Pinjaman Jasa Bergilir”.

Masyarakat memberikan pengembalian tanpa adanya paksaan sedikitpun dari pihak BUMDES. Kemudian hasil kelebihan dari masyarakat tersebut digunakan untuk biaya operasional dan sisanya dikembalikan lagi pada masyarakat untuk kesejahteraan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Keterlibatan masyarakat dalam setiap program yang dikembangkan BUMDES sangat penting karena akhirnya yang melaksanakan program tersebut adalah masyarakat.

BUMDES memerlukan masukan dari masyarakat dalam

menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain, masyarakat memerlukan jasa BUMDES untuk mendapatkan program-program peningkatan usaha yang relevan. Jalinan semacam itu dapat terjadi jika BUMDES aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Sementara berdasarkan dimensi kebutuhan masyarakat, tujuan partisipasi masyarakat dalam BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah menurut peneliti adalah untuk:

- a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memperoleh kemajuan BUMDES dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
- c. Menjamin relevansi program BUMDES dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- d. Memperoleh kembali masyarakat yang terampil, makin meningkat kemampuannya dan ekonominya.

Dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Setelah mengumpulkan fakta dan menetapkan rencana, beberapa keputusan harus dibuat pada tahapan ini, yang mencakup tindakan apa saja yang harus dilakukan atau pesan apa saja yang ingin disampaikan, serta jenis media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan

dimaksud.¹²⁶

Pada tahap pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, menurut peneliti perlu banyak komunikasi yang dilakukan. Keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh tujuh hal, yaitu:

- a. Kredibilitas, komunikasi dimulai dengan iklim atau situasi kepercayaan. Iklim dibangun melalui tindakan organisasi yang menggambarkan kesungguhan untuk melayani pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat.
- b. Konteks, program komunikasi harus disesuaikan dengan realita lingkungan.
- c. Isi pesan, pesan harus memiliki makna dan memiliki relevansi dengan situasi yang dihadapi penerima pesan.
- d. Kejelasan, pesan harus disampaikan dengan menggunakan istilah-istilah yang sederhana.
- e. Kontinuitas dan konsistensi, komunikasi memerlukan *repetisi* (pengulangan) untuk mencapai penetrasi. Repetisi, yang dilakukan dengan berbagai variasi, dapat memberikan sumbangan untuk pembelajaran dan persuasi, namun ceritanya harus tetap konsisten.
- f. Saluran, praktisi BUMDES harus menggunakan saluran yang sudah mapan (*established*) untuk menyampaikan pesan. Saluran yang dipilih

¹²⁶ Morissan, *Manajemen Public Relation: Strategi Menjadi Humas Profesional*, h. 183

haruslah saluran yang digunakan dan juga dihormati oleh khalayak sasaran.

- g. Kemampuan penerima, komunikasi harus memperhitungkan kemampuan penerima. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan adalah ketersediaan khalayak, kebiasaan, kemampuan membaca dan pengetahuan yang mereka miliki.¹²⁷

Selanjutnya kegiatan ekonomi untuk pemupukan modal sangat penting dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah mengingat bahwa perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan selanjutnya karena masyarakat diharapkan untuk bisa tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain. Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin dan pengangguran melalui pembelajaran dan pemberdayaan mulai konsep awal sampai akhir program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah adalah pada koridor penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang bertujuan mewujudkan perubahan sosial masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut:

- a. Bermanfaat bagi warga miskin dan pengangguran

¹²⁷ Morissan, *Manajemen Public Relation: Strategi Menjadi Humas Profesional*, h. 206

- b. Memberikan peningkatan ekonomi
- c. Perubahan perilaku
- d. Lingkungan tertata
- e. Permasalahan dapat terselesaikan

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan BKM mampu secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para masyarakat dan unit pengelola serta sebagai proses pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan BKM kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan pengangguran terutama masyarakat miskin. Tak kalah pentingnya mampu menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga terhadap program-program pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara dan berkelanjutan khususnya di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah .

Pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, memiliki beberapa tingkatan:

- a. Derajat keterlibatan, mulai dari sekedar mengetahui adanya suatu usaha sampai dengan ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga, maupun materi.
- b. Prakarsa keterlibatan, yang dapat dibedakan antara keterlibatan spontan dengan persuasif atau melalui paksaan. Yaitu tingkat otoritas, yang pada

dasarnya memberikan wewenang kepada kelompok untuk memantapkan keputusannya.

- c. Organisasi keterlibatan, yang dapat dibedakan menjadi keterlibatan perseorangan atau secara kelompok. Hal ini dapat dikatakan sebagai tingkat penasihat/sugesti yang dibangun atas dasar saling mengerti.
- d. Sikap dalam keterlibatan, mulai dengan yang mendukung, setuju sampai yang menentang. Hal ini merupakan tingkat saling mengerti yang tujuannya untuk membantu para masyarakat kelompok agar memahami masing-masing fungsi dan sikap yang dapat mengembangkan kerja sama yang lebih baik. Dengan demikian secara pribadi mereka akan lebih banyak terlibat, bersikap kreatif dan juga lebih bertanggung jawab.

Beberapa macam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah menurut konteks antara lain semua aktor dalam konteks kelembagaan disebut sebagai stakeholder potensial. Yaitu kelompok yang memiliki keputusan-keputusan yang akan dibuat berkenaan dengan agenda pendidikan dan organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam proses ketetapan pendidikan. Sedangkan kelompok yang mengejar kepentingan mereka dalam situasi (konteks) suatu organisasi tertentu dalam institusi disebut stakeholder kinetik atau aktif. Masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan organisasi meningkatkan kemungkinan tindakan yang berhasil.

Prinsip-Prinsip sebagaimana diperhatikan dalam mengelola pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah menurut peneliti yaitu:

a. Prinsip pencapaian tujuan

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dilakukan dengan maksud agar semua masyarakat dalam kondisi siap pakai setiap saat dalam melaksanakan program BUMDES.

b. Prinsip efisiensi

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga memperoleh hasil yang baik dengan kinerja masyarakat yang meningkat.

c. Prinsip administratif

Pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah hendaknya memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

d. Prinsip kejelasan tanggung jawab

Pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES

bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah perlu adanya pengorganisasian (pembagian) kerja, serta semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dideskripsikan dengan jelas.

e. Prinsip kekohesifan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah hendaknya terealisasi dalam bentuk proses kerja program BUMDES yang sangat kompak. Adanya kerjasama yang baik antara personil yang satu dengan personil yang lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah harus diperhatikan, agar tujuan mengatasi pengangguran di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dapat dicapai yang meliputi: tujuan, efisiensi, administratif, tanggung jawab, dan kekohesifan.

Pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat melalui pinjaman di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah sekarang telah berdiri beberapa kelompok usaha masyarakat kecil menengah (UMKM) berupa pembuatan sangkar burung, pembuatan parut, bantal guling, pedagang keeling dan warung kecil yang kesemuanya dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat dalam sistem tanggung renteng, setiap kelompok juga aktif melakukan diskusi yang diketuai oleh ketua kelompok

masing-masing dalam mengembangkan usaha dan mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian sehingga nantinya akan mendapatkan pinjaman lagi yang lebih besar dari program BUMDES. Dalam rangka penanggulangan pengangguran, beragam kebersamaan tiga pilar utama pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli (LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya) sangat diperlukan. Kebersamaan tersebut mutlak diperlukan karena diharapkan mampu mewujudkan sinergitas kepentingan dan program ketiga pilar tersebut yang pada akhirnya mampu mempercepat proses penanggulangan pengangguran.

Dengan disahkannya hal tersebut sebagai keputusan desa, maka segala hal yang ada dalam dokumen UPK menjadi pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, termasuk penggunaan data hasil sensus dan pemetaan swadaya sebagai basis data KK atau jiwa miskin bagi semua pihak termasuk BPS dan lembaga-lembaga lain yang berkepentingan.

- a. Hasil kegiatan desa adalah rencana induk kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan tingkat desa yang menjadi acuan dalam kegiatan pembangunan desa khususnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan,
- b. Hasil pencapaian merupakan kajian peninjauan ulang terhadap hasil sebelumnya serta kajian ulang pemetaan swadaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin melalui perencanaan partisipatif dari tingkat basis,

- c. Hasil pencapaian ini melalui tahapan proses yang panjang atas dasar permasalahan dan kebutuhan bersama yang ada di tingkat RT, RW dan desa serta potensi yang dimiliki sebagai dasar dalam pemecahan permasalahan yang ada,
- d. Hasil review merupakan hasil akhir yang perlu upaya tindak lanjut dari seluruh stakeholder yang terkait dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan dan dapat dipertanggungjawabkan bersama untuk mewujudkan desa yang dan madani.

Saran dan rekomendasi untuk desa sebagai berikut:

- a. Agar keberhasilan ini dapat dijadikan pedoman atau usulan dalam kegiatan pembangunan program penanggulangan pengangguran desa dan sebagai alat kontrol oleh masyarakat pada setiap kegiatan pembangunan melalui azas transparansi dan akuntabilitas.
- b. Diharapkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder baik warga masyarakat, pemerintah desa, swasta, kelompok peduli dan BKM selaku motor penggerak untuk tetap bekerjasama dalam menjunjung tinggi amanah masyarakat melalui program pinjaman secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. Bagi segenap masyarakat BKM desa untuk selalu meningkatkan kepedulian bersama sesuai dengan komitmen sebagai gerakan bersama, kesetaraan, kejujuran dan kerelawanan yang tangguh dalam melaksanakan amanah dari seluruh warga miskin agar dapat

dipertanggungjawabkan secara materiil maupun moral di dunia ataupun di akherat kelak.

Hadirnya Jasa “Pinjaman Bergulir” dari BUMDES membawa hal baik bagi kesejahteraan masyarakat disana, karena mampu meringankan beban faktor produksi masyarakat terutama para nelayan dan home industri yang membutuhkan modal dalam memperlancar usaha melautnya dan usaha home industrinya. Pinjaman tersebut dikembalikan para nelayan dan UKM dengan penambahan yang tidak ditentukan sebelumnya oleh pihak BKM. Penambahan tersebut diperjanjikan sendiri oleh para nelayan dan UKM. Perjanjian atau kesepakatan pengembalian jasa pinjaman tersebut telah memberi keuntungan bagi para nelayan dan pelaku UKM, karena mereka mampu mendapatkan modal yang selama ini mereka butuhkan tanpa harus meminjam pada pihak yang mencari keuntungan semata terutama oleh rentenir. Keuntungan menurut mereka adalah tidak adanya keharusan atau paksaan pada mereka berapa nominal penambahan yang harus mereka keluarkan. Besarnya nominal yang dilebihkan dalam pengembalian sesuai dengan hasil panen mereka dan sesuai dengan kemampuan para nelayan masing-masing.

Sedangkan di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, masyarakatnya merasa sangat antusias dalam hal perjanjian jasa “Pinjaman Bergulir” yang dilakukan oleh BKM dari BUMDES. Program pemerintah seperti ini adalah salah satu cara yang bagus dalam mementaskan kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Warga masyarakat merasa sangat

dibantu dengan adanya program tersebut. Setelah terbentuk BKM, perwakilan dari tiap RT dikumpulkan dan bersama-sama melakukan diskusi atau mencari kesepakatan berapa persenkah atau berapa nominalkah penambahan pengembalian yang harus diberikan oleh warga Sei cabang Barat dalam pengembaliannya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kelebihan tersebut digunakan untuk biaya operasional dan sisanya akan dikembalikan pada masyarakat guna memberi kesejahteraan bagi mereka sendiri. Pinjaman tersebut juga harus digunakan untuk kegiatan produktif, karena seperti yang telah dijelaskan diatas, program ini ada untuk menjadikan masyarakat dan madani. Masyarakat merasa senang dengan sistem kerja dan proses pinjaman bergulir ini. Karena disamping meringankan beban, pinjaman ini mampu memicu masyarakat terutama warga miskin dan pengangguran untuk mengembangkan usahanya. Prosesnya juga mudah dan cepat, uang sama sekali tidak berkurang, apabila ingin meminjam Rp. 2.000.000,00 maka uang yang diterima tetap Rp. 2.000.000,00

Manfaat dan tujuannya juga telah sedikit banyak dirasakan oleh Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah tersebut, diantaranya berkurangnya angka kemiskinan, pengangguran, memberdayakan ekonomi umat dan masyarakat terkendali (seperti preman) dan manfaat-manfaat lainnya.

Dari penjelasan diatas, tentu dapat disimpulkan bahwa kegiatan jasa pinjaman bergulir BUMDES ini memberi dampak baik bagi masyarakat,

mereka merasa mendapatkan bantuan dalam segi modal maupun segi kemasyarakatan, dan juga akan kesejahteraan umat dalam bidang ekonomi.

Hasil ini sesuai pendapat Ngalim Purwanto¹²⁸ yang secara lebih lengkap lagi, kebutuhan masyarakat dari program BUMDES diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi.
- b. Memperoleh BUMDES apabila terdapat masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- c. Menjamin relevansi program BUMDES dengan kebutuhan masyarakat
- d. Memperoleh kembali masyarakat-masyarakat masyarakat yang makin meningkat kemampuannya dan pada akhirnya mengurangi pengangguran.

Seperti telah dijelaskan diatas, pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah diharapkan harus bisa melaksanakan prinsip-prinsip pengembangan keunggulan *partisipatoris*, hal tersebut didukung dengan adanya sumberdaya yang berkualitas yaitu tersedianya tenaga yang profesional sesuai bidangnya masing-masing serta siswa yang berkompetensi, peran serta dan tanggung jawab pengelola BUMDES dan masyarakat bagi pemberdayaan ekonomi umat dan yang tidak kalah penting yaitu adanya kebebasan penuh bagi pihak BUMDES dan penanggung jawab pembina

¹²⁸ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, h. 194

masyarakat untuk mengembangkan skill dan perekonomian melalui prakarsa sendiri serta dukungan dari masyarakat sekitar dan lingkungan yang strategis, maka dengan adanya faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan program BUMDES yang diharapkan.

Selanjutnya hal yang terpenting dalam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah adalah adanya koordinasi. Persoalan koordinasi merupakan hal yang urgen dalam rangka menentukan arah program BUMDES di masa yang akan datang dalam menanggulangi pengangguran. Langkah ini dilakukan melalui proses mengorganisir berbagai macam bagian yang secara organisatoris terkait dengan bagian yang lainnya. Koordinasi ini sangat penting untuk memperlancar proses pengambilan keputusan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah. Disamping itu sangat besar pengaruhnya pada keseluruhan pelaksanaan volume kerja dalam rangka mencapai tujuan bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Koordinasi antar sumber daya yang ada ini dilakukan secara berkala, yaitu pada setiap akhir bulan. Koordinasi dilakukan guna membahas permasalahan yang dihadapi dan merumuskan rencana pada masa berikutnya. Jadi pola hubungan yang dijalin antar komponen mengaplikasikan atau mengaktualisasikan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah lebih mementingkan pembentukan masyarakat memiliki sumberdaya yang berkualitas dalam mengatasi.

Dalam pelaksanaan hubungan perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Setelah mengumpulkan fakta dan menetapkan rencana, beberapa keputusan harus dibuat pada tahapan ini, yang mencakup tindakan apa saja yang harus dilakukan atau pesan apa saja yang ingin disampaikan, serta jenis media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan dimaksud.

3. Analisis Evaluasi BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

Evaluasi merupakan kegiatan pengadaan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi dan memberikan ganjaran.¹²⁹ Evaluasi pengembangan ekonomi umat dalam program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dilakukan melalui pelaporan setiap kelompok.

Bagaimanapun baik dan teraturnya program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah yang dilakukan, bila tanpa adanya upaya evaluasi dan pengawasan, maka

¹²⁹ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *op.cit*, hl. 4

tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai dengan optimal. Kegiatan evaluasi dan pengawasan ini dilakukan sesuai dengan perencanaan semula untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai dan yang belum terealisasi dalam jangka waktu tertentu. Dengan evaluasi dan pengawasan yang baik akan dapat diketahui kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat organisasi untuk selanjutnya dapat dicarikan solusi pemecahannya. Fungsi kegiatan pengawasan lainnya adalah menentukan data-data yang menjadi faktor adanya penyimpangan dalam kinerja.

Evaluasi BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah dilakukan melalui:

- a. Pengawas UPK
- b. UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek. Pedoman pelaksanaan kegiatan pinjaman ini adalah pedoman dasar yang menjadi pegangan fasilitator dan pihak-pihak terkait (pelaku BUMDES) dalam mengawal pelaksanaan kegiatan “Pinjaman” oleh UPK. Pedoman pelaksanaan ini hanya berisi pokok-pokok kegiatan yang harus dipahami dalam memberikan pendampingan kepada LKM, UPK dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Evaluasi juga dilakukan dengan saling mengawasi dan memberikan teguran diantara kelompok usaha dalam mengelola dana yang diberikan BUMDES dan saling mendukung usaha yang dilakukan masyarakat, karena

setiap pengembalian yang tepat waktu dari setiap kelompok usaha akan mendapatkan reward satu sampai dua juta sebagai bagi hasil dari peminjaman tersebut yang diberikan kepada kelompok.

Evaluasi menurut peneliti pada dasarnya harus terdiri atas dua criteria: pertama efektivitasnya, yaitu sampai seberapa jauh tujuan telah tercapai, misalnya apakah memang masyarakat sudah merasa terlibat dalam masalah evaluasi program BUMDES, apakah ada kemajuan dari pengurangan pengangguran, apakah mereka sudah menunjukkan perhatian terhadap keberhasilan program, apakah mereka telah mau memberikan masukan untuk perbaikan program, dan sebagainya. Kedua efisiensinya, yaitu sampai seberapa jauh sumber yang ada atau yang potensial yang telah digunakan secara baik untuk kepentingan kegiatan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

Setiap kelompok usaha yang mendapatkan pinjaman dari BUMDES diuntut dan diarahkan untuk *transportasi dan akuntabel*. Kelompok harus memiliki akses yang memadahi terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. *Akuntabilitas* diwujudkan dalam bentuk seriap pengeluaran dana dalam pelaksanaa pengadaan barang atau jasa dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, seperti pencatatan penerimaan dan pengeluaran, kuitansi pembelian dan bukti

pembayaran honor, maupun secara teknik seperti kuantitas dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan rencana.

Evaluasi juga dilakukan melalui usul dari masyarakat kelompok terhadap permasalahan yang dihadapi untuk dipertimbangkan dan diskusikan dibawah bimbingan UPK untuk dicarikan solusi dan inisiatif untuk mengatasi permasalahan sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan menjadikan pengangguran di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah semakin berkurang dan ekonomi umat semakin meningkat. Evaluasi tidaklah dilaksanakan oleh semua masyarakat tetapi ada badan khusus yang bertugas untuk mengevaluasi yaitu Badan Pemeriksa (BP). Hasil dari pemeriksaan dilaporkan kepada masyarakat setiap tri wulan dan pada tutup buku akhir tahun.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah ini dimaksudkan agar di kemudian hari, jika suatu kegiatan yang sama dilakukan, tidak menjumpai lagi hambatan yang sama. Berdasarkan hasil penilaian tersebut pengelola BUMDES dan kelompok harus mengambil kebijaksanaan tertentu, yang pada gilirannya melakukan penelitian, untuk kemudian mengadakan perencanaan, guna selanjutnya menggiatkan pelaksanaan.¹³⁰ Dengan demikian, proses evaluasi BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah tidak berlangsung secara *linear*, melainkan *circular* atau melingkar, dari

¹³⁰ Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis...*, h. 104

evaluasi dialirkan umpan balik (*feed back*) ke penelitian, yaitu menentukan masalah. Jelasnya, jika sudah dilakukan kegiatan melalui tahap penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, hasil penilaian tersebut diteliti lagi, direncanakan lagi, dilaksanakan lagi dan dinilai kembali.

Kemudian dalam menyusun strategi dan program-program partisipasi masyarakat dalam evaluasi BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, hendaknya juga dilakukan dengan manajemen yang rapi, yaitu dengan memetakan dengan jelas perencanaannya, pengorganisasiannya, penanggung jawab dan sebagainya. Sehingga terjadi pengurangan pengangguran dan peningkatan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah yang berangkat dari partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.

D. Analisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peran BUMDES bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

Perspektif ekonomi Islam terhadap peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah terletak pada pemberdayaan usaha masyarakat untuk meningkatkan derajat ekonomi umat muslim melalui pengguliran dana juga sekaligus memberi pelatihan. Karena memang keberhasilan program BUMDES tidak semata dilihat dari kemandirian usaha tetapi juga pengetahuan keislaman. Sehingga dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diterima menjadi tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang disampaikan oleh Sahal Mahfud dalam *Nuansa Fiqih Sosial*¹³¹ bahwa dalam rangka pengembangan masyarakat miskin tidak boleh hanya diberi ikan terus-menerus tetapi juga harus memberi kailnya. Namun dengan memberi kail saja tentu tidak cukup karena mereka juga harus diberitahu cara mengail yang baik, lahan yang baik, dan bagaimana ia dapat menggunakan kail untuk mendapatkan ikan. Ini berarti sasaran dakwah tidak hanya cukup diberi modal tetapi mereka juga harus diberi keterampilan. Demikian halnya dengan masyarakat yang juga membutuhkan keterampilan teknis dalam meningkatkan kemampuan usahanya. Pemberian keterampilan inilah yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemberian tambahan modal usaha yang dilakukan dalam BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah merupakan metode yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Meskipun hanya usaha kecil namun dampak dari pemberian modal usaha ini akan menambah kepercayaan diri masyarakat. Seperti yang disampaikan Muhammad Sulthon¹³² bahwa dakwah ekonomi adalah upaya mewujudkan realitas kehidupan umat Islam dan ajaran-ajaran Islam tertentu yang dapat berfungsi untuk meningkatkan tingkat sosial-ekonomi umat. Penumbuhan etos kerja yang diarahkan pada kualitas sumber daya manusia yang seimbang dengan sumber daya alam maupun lapangan kerja yang tersedia atau yang mungkin diciptakan, merupakan kegiatan yang paling menentukan bagi tercapainya keadaan

¹³¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994, h.

¹³² Muhammad Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman Desain Ilmu Dakwah Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, h. 19

ekonomi yang stabil. Dengan demikian, maka dakwah ekonomi, dilihat dari tujuan dan pesan dakwahnya dapat didefinisikan sebagai kegiatan dakwah umat Islam yang berusaha mengimplementasikan ajaran Islam yang berhubungan dengan proses-proses ekonomi guna peningkatan taraf hidup umat Islam. Usaha menggerakkan orang lain untuk melakukan apa yang digerakkan meliputi aktivitas pemberian motivasi, aktivitas menciptakan situasi dan kondisi perbaikan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat.

Menurut Syaifuddin ada dua pendekatan yang efektif untuk memperdekat jarak antara si kaya dengan si miskin untuk mewujudkan keadilan dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan. *Pertama* pendekatan parsial. Dalam hal ini pertolongan terhadap si miskin/ lemah dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mendesak dan gawat. *Kedua* pendekatan struktural. Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinyu yang bertujuan si miskin/si lemah dapat mengatasi kemiskinannya, seperti melalui modal usaha. Pendekatan struktural harus lebih dulu menemukan dan mencari data base dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kemiskinan dan kelemahan dan berusaha memecahkannya.¹³³ Cara pendistribusian seperti ini dapat meningkatkan semangat mereka dalam berusaha serta kewajiban untuk mengembalikan pinjaman akan menciptakan tanggung jawab serta mendorong seseorang untuk meningkatkan produktifitasnya.

Peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang

¹³³ Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif Islam*, Jakarta, CV. Raja Wali, 1987, h. 117

Barat Kalimantan Tengah akan dapat mendatangkan kemaslahatan umum karena semakin banyak fakir miskin yang tertolong dengan meningkatnya pendapatan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Setiap masyarakat dalam sistem tanggung renteng dalam program BUMDES, setiap kelompok juga aktif melakukan diskusi yang diketuai oleh ketua kelompok masing-masing dalam mengembangkan usaha dan mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian sehingga nantinya akan mendapatkan pinjaman lagi yang lebih besar dari program BUMDES

Penekanan pentingnya kerja sama dan tolong menolong (*ta'awwun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan pandangan hidup demokratis (*musyawarah*). Al-Qur'an menyuruh manusia agar bekerja sama dan tolong-menolong. Itu hanyalah dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Allah. "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah..." (QS.5:2).¹³⁴

Ajaran Islam juga menekankan pentingnya masyarakat untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap ataupun langkah dalam mengusahakan sesuatu, seperti tampak dalam kutipan Al-Qur'an: "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah..." QS.3:159). Bahkan dalam masalah keduniaan, seperti mengelola koperasi, Islam mewajibkan bermusyawarah. Al-Qur'an menyebutkan: "...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

¹³⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, h. 22

musyawarah antara mereka..." (QS.42:38). Acuan moralnya ialah bahwa manusia berkedudukan sama di hadapan Allah SWT, dan yang membedakan mereka hanyalah segi ketakwaan. Kutipan Al-Qur'an menyebutkan: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..." (QS.49:13). Dengan dasar ini setiap masyarakat dalam kelompok mempunyai kesempatan yang sama dan setiap orang di antaranya adalah peyumbang saran, pendapat, dan mempunyai suara yang sama.¹³⁵

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja hal inilah yang dikembangkan dalam BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah . Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem- sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal, merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi

¹³⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, h. 26

Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.¹³⁶

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang "ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari

¹³⁶ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 10

prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terns didukung dan diperkuat.¹³⁷

Dalam sistem ekonomi yang demikian bebas, dimana persaingan sangat kompetitif, ekonomi rakyat sulit diharapkan untuk keluar sebagai pemenang dalam persaingan tersebut, kecuali jika ekonomi kerakyatan yang dimiliki Indonesia mempunyai daya kreasi, inovasi, tingkat produktivitas tinggi, dan kemampuan membaca peluang yang lebih baik. Ini adalah diantara ciri dari ekonomi rakyat yang berbasiskan pada keunggulan kompetitif. Jika hipologi usaha kecil atau ekonomi kerakyatan sudah demikian, maka sangat mungkin bersaing dalam pasar bebas.¹³⁸

Hemat peneliti, dari berbagai kelemahan ekonomi rakyat selama ini sebenarnya dapat membuat berbagai acuan sederhana yang dapat dijadikan pedoman untuk dihindari dalam pelaksanaannya. Untuk itu pemahaman mengenai makna ekonomi rakyat, perlu ada upaya pengembangan ekonomi rakyat, yang mana dapat dilihat dari tiga sisi yakni: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Kedua, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang amat pokok

¹³⁷ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 11

¹³⁸ Adi Sasono, "Perspektif Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Era Pasar Bebas", dalam Adi Sasono (et,al's) *Solusi Islam atas Problematika Ummat*, Jakarta : Gema lusam Press, 1998, h. 19.

adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. Ketiga, mengembangkan ekonomi rakyat yang mengandung pula arti melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan bukan melemahkan daya kembang dan prakarsanya.

Peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah, yang sebagian besar terdiri dari usaha kecil dan menengah, industri kecil dan industri rumah tangga (pengrajin), koperasi, petani, nelayan, penambang, serta usaha informal dan tradisional memang perlu mendapat prioritas, sebagai perwujudan azas kebersamaan dan azas kekeluargaan ; perekonomian rakyat mempunyai kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia, seperti ; dalam hal penyediaan lapangan kerja.¹³⁹ Sesungguhnya ajaran ekonomi Islam adalah sistem kehidupan yang tepat dan berakhlak luhur yang mengutamakan kepentingan bersama dan penuh dengan gotong royong sehingga mampu meningkatkan derajat ekonomi umat.

¹³⁹ Nur Habibah, “Keunggulan Ekonomi Islam Dimensi Moral “,Jurnal Tiga Bulanan Cides Vol. I, No. 2, April-Juni, 1996, h. 70.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan:

1. BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah mendapat dana desa sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan pendapatan dari dana bergulir sebesar Rp. 18.000.000,- pertahun. Peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat dilakukan pertama dengan ikut terlibat dalam perencanaan dengan ikut serta memberikan masukan terhadap program BUMDES dan mengidentifikasi masyarakat yang layak mendapat bantuan program, mengikuti aturan pencairan pinjaman dan merencanakan kemajuan usaha yang dilakukan kelompok, kedua ikut melaksanakan program kerja dengan mengikuti aturan yang telah disepakati dan melakukan kerja kolektif kelompok usaha dalam mengembangkan usaha yang dilakukan dalam kelompok dengan memanfaatkan pinjaman sebaik mungkin bagi pengembangan usaha dan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai kesepakatan dengan pengelola BUMDES, ketiga melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan dan menerima pengawasan dari pengawas UPK dan saling tukar pikiran dengan pengawas dan kelompok untuk kemajuan bersama, setiap kelompok bertanggung jawab dengan pinjaman yang telah diterima dan jika salah satu dari anggota kelompok

tidak bisa mengembalikan maka akan ditanggung seluruh kelompok tersebut sehingga proses koordinasi, saling mengevaluasi dan saling mengawasi intens dilakukan oleh kelompok usaha yang mendapatkan bantuan program BUMDES mandiri.

2. Perspektif ekonomi Islam terhadap peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah terletak pada adanya unsur kerja sama dan tolong menolong diantara masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro sehingga mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi umat yang berdasarkan *ta'awwun* dan *ukhuwah*.

B. Saran

Hasil dari penelitian tindakan kelas ini dapat digunakan oleh beberapa pihak, antara lain:

1. Pengelola BUMDES

Program BUMDES adalah program yang tujuannya untuk memajukan masyarakat dalam kesejahteraannya. Tujuannya untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam BUMDES dilaksanakan dengan membangun kelembagaan masyarakat di tingkat desa agar mengakar dan representatif. Keberadaannya diharapkan menjadi pondasi terbangunnya tatanan masyarakat berdaya. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi gerakan bersama yang inklusif berlandaskan kemitraan dan kesetaraan. Dalam kegiatan yang telah dilaksanakan, diharapkan benar-benar mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama

masyarakat miskin. Dana yang tersedia dari pemerintahan tersebut, sebisa mungkin dialokasikan dengan yang sebenarnya kepada masyarakat miskin dan tidak terdapat manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga terjadi penyaluran yang benar dan kepada orang yang benar pula.

2. Kepala Desa

Kepala desa perlu mengelola dan menyediakan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan BUMDES sehingga program tepat guna dalam memberdayakan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

3. Anggota Kelompok Usaha

Anggota kelompok usaha yang mendapat bantuan dari BUMDES, harus benar-benar mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima dengan bekerja giat dan meningkatkan usahanya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mampu memberdayakan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah

4. Masyarakat

Masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam program yang dikembangkan oleh BUMDES Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M., *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqh*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Agusliansyah, Khairul, “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 4, 2016: 1785-1796
- Ali, Daud dan Daud, Habibah, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadah, 2014
- Aminudin Sanwar. dalam *Diktat Pengantar Ilmu Dakwah*
- An-Nabhani, Tagyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, 1996
- Aravik, Havis, *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- As'ari, Syafari Imam, *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2011
- Aslamiah, Rufaidah, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggunharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (KUPAS) Penggung Lestari, Sewun, Bantul, Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan kalijaga, 2017
- Asy Shidieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Badan Pusat Satatistik, *Indikator Ekonomi*, Jakarta, BPPS, 2016
- Bafadhol, Ibrahim, *Supervisi Pembelajaran Teori dan Aplikasinya dalam Membina Profesionalitas Pendidik*, Jakarta: Bumi Aksarah, 2002
- Budiharjo, Eko, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Bandung: Alumni, 2006
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988

- Dale, Ernest Michelin, *Metode-metode Manajemen Moderen*, Jakarta: Andalas Putra, 2001
- Departemen Dalam Negeri, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan*. Jakarta, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Effendy, Onong Uchjana, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992
- Firdaus, Ismet dan Zaky, Ahmad, *Upaya Meningkatkan Equity Perempuan Dhuafa Ndesa Bojong Indah, Parung*, Jakarta: Dakwah Press, 2008
- Gunawan, Ary H., *Administrasi Sekolah; Administrasi Pendidikan Mikro*, Jakarta: PT. ineka Cipta, 1996
- Habibah, Nur, “Keunggulan Ekonomi Islam Dimensi Moral”, *Jurnal Tiga Bulanan Cides Vol. I, No. 2, April-Juni, 1996*
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2004
- Handoko, Hani, *Manajemen*, Edisi II, Yogyakarta: BPF, 2008
- Hasan, Tholhah, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta : Lantabora, 2005
- Hikmah, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama, 2006
- Ibrahim, Tahir, *Pembahasan Ekonomi Islam Marx dan Keynes*, Jakarta: tp., 1967
- Ismail, Asep Usman dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim: Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Badak Putih Dan Kampung Satu Duit*, Jakarta: Dakwah Press, 2007
- Kahf, Monzer, *the Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System: Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Kancana, Wayan Nur dan Sumartana, P.P.N., *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : Usaha Nasional, t.th
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002

- Karim, M. Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya Bekerjasama Dengan P3EL UII, 1993
- Kristiniati, Rahayu dan Choiriyah, Ilmi Usrotin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo”, *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 2, September 2014, h. 103-220
- Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bandung: Penerbit Humaniora, 2006
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002
- Morissan, *Manajemen Public Relation: Strategi Menjadi Humas Profesional*, Jakarta: Kencana, 2008
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE
- Mulyawan, Rahman, 2016, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, Bandung, Unpad Pres
- Munir, Muhammad dan Ilaihi, Wahyu, *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993
- Panglaykim, *Manajemen suatu Pengantar*, Jakarta: Gladia Indonesia, 2007
- Prawiranegara, Saifudin, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: tp., 1967
- Purwanto, M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Qutb, Sayyid , *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 2004
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999

- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ridlwani, Zulkarnain, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3 September-Desember, 2013*
- Sa'ud, Udin Syaefudin dan Makmun, Abin Syamsuddin, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Kompetensi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Saefudin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam perspektif Islam*, Jakarta, CV. Raja Wali, 1987
- Sagita, Garnies Lellyana, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)", Skripsi, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Sasono, Adi, "Perspektif Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Era Pasar Bebas", dalam Adi Sasono (et,al's) *Solusi Islam atas Problematika Ummat*, Jakarta : Gema lusam Press, 1998
- Shulhan, Muwahid dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013
- Siagian, Sondang P., 2009, *Filsafat Administarsi*, Jakarta: Haji Masagung, 2009
- Soenarjo^{dkk}, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006
- Soetjipto dan Kosasi, Rafli, *Profesi Kegiatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010
- Sulthon, Muhammad, *Menjawab Tantangan Zaman Desain Ilmu Dakwah Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Syukur, Fatah, *Manajemen Pendidikan*, Semarang: Fakultas Tarbiyah dan PMDC, 2006

- Tilaar, H.A.R, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007
- Triyono, Bambang, dkk, *Evaluasi PNPM Mandiri, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral*, Bappenas, 2013
- Wafiyah, Varkhatun, “Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Mengatasi Pengangguran di Desa Sumberejo Mranggen”, Skripsi, Semarang: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Semarang. 2017
- Welsh, N.Mc. Ginn T., *Desentralisasi Pendidikan*, Jakarta: Logos, 2003
- Yamani, Ahmad Zaki, 2007, *Syari’at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan
- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: al Ma’arif , 1997
- Yasin, A.Z. Fachri, Dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, Pekanbaru: UNRI Press: 2001

<https://id.wikipedia.org/wiki/BUMDes>

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA DESA

1. Bagaimana keadaan masyarakat Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana kondisi ekonomi secara umum masyarakat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
3. Kapan mulainya program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
4. Apa tujuan dari program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
5. Apa manfaat dari program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
6. Bagaimana peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
7. Bagaimana pelaksanaan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
8. Faktor pendukung dan penghambat apa saja pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
9. Bagaimana peran kepala desa pada program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?

KETUA PROGRAM BUMDES

1. Kapan mulainya program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
2. Apa tujuan dari program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
3. Apa manfaat dari program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
4. Bagaimana peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
5. Bagaimana perencanaan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
6. Bagaimana pelaksanaan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
7. Bagaimana pengawasan program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
8. Program usaha apa saja yang dikembangkan dalam program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
9. Faktor pendukung dan penghambat apa saja pelaksanaan BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
10. Bagaimana peran kepala desa pada program BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?

MASYARAKAT

1. Apa yang anda ketahui tentang program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
2. Usaha apa saja yang dilakukan dalam program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana keterlibatan anda dalam program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan program BUMDES di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?
5. Apa manfaat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah bagi anda?
6. Bagaimana peran BUMDES bagi pemberdayaan ekonomi umat di Desa Sei Cabang Barat Kalimantan Tengah?

BUMDES

Pantai Lunci Kabupaten Sukamara
Jl. Kelapa Dua Desa Sungai Cabang Barat Kalimantan Tengah, Rt 06

Nomor : UPK-PL/PNPM-Mpd/ IV/ 2018 Pantai Lunci, 21 Mei 2018
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : Yth. Dekan UIN Walisongo Semarang
Di
Semarang

Perihal : Balasan permohonan izin penelitian

Menanggapi Surat Saudara No. B-1212/Un.10.5/D1/TL.00/05/2018 Tanggal 14 Mei 2018
Permohonan Izin Penelitian, Pada Mahasiswa;

No.	Nama	NIM	Judul Skripsi
1	Siti Fatimah	132411052	Bumdes Dan Peremberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam

Dengan Ini Pemberitahuan Pada Skripsinya Bahwa Kami Tidak keberatan Dengan
Permohonan Yang Di Maksud, Untuk Pelaksanaan Selanjutnya Supaya Mahasiswa Yang
Bersangkutan Berhubungan Dengan koordinator UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

Demikian Surat Balasan Dari Kami.

Ketua UPK



Irai Hami





WAWANCARA DENGAN KETUA PROGRAM BUMDES DESA SEI CABANG BARAT KALIMANTAN TENGAH



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA SEI CABANG BARAT KALIMANTAN TENGAH



**WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA SEI CABANG
BARAT KALIMANTAN TENGAH**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Fatimah
NIM : 132411052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Tempat & tgl Lahir : Sei Cabang Barat, 31 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Motto : Do The Best and pray, god well take care of the rest.
Agama : Islam
Alamat : Sei Cabang Barat RT. 06 Kecamatan Pantai Lunci Kab.
Sukamara

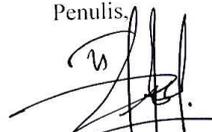
Jenjang pendidikan :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. MI Raudhatul Ulum | Tahun Lulus 2006 |
| 2. SMP Darul Hijrah Putri | Tahun Lulus 2010 |
| 3. SMA Darul Hijrah Putri | Tahun Lulus 2013 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Desember 2018

Penulis,



Siti Fatimah
NIM: 132411052